PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Telp. (0358)3550772 Fax. (0358)3550772 Nganjuk 64412

Nganjuk, 20 Februari 2025

Yth. Asisten Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Di
N G A N J U K

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.8.6.3 / 220 /411.304/ 2025

No	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Revisi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 (Satu) Bundel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

Tembusan Yth:
Kepala Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dalam penilaian capaian kinerja berdasarkan Tugas Pokok Fungsi yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Selain itu, laporan kinerja merupakan bagian untuk evaluasi kinerja pada setiap individu maupun bidang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menggambarkan pencapaian kerja selama Tahun 2024 yang masih banyak kekurangan. Untuk itu, dapat diberikan masukan berupa saran dan kritik yang bermanfaat guna peningkatan kinerja yang lebih baik, sehingga hasil kerja untuk tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat dan terwujud sepenuhnya dengan baik.

Untuk itu sejak Tahun 2017 ditetapkan kebijakan dalam Bidang Sosial yakni, Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat. Sedangkan Kebijakan Bidang PPPA yakni, Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak

Dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap, Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat ditetapkan Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk terwujudnya Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG, Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak, Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM Perempuan, Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, dan Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Sub kegiatan – Sub kegiatan sesuai dengan kegiatan serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahun 2024 terdapat sasaran yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yakni, Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial, Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif, Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Secara garis besar kinerja organisasi dapat mencapai sasaran tersebut.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan peluang-peluang menuju perbaikan yang terus dilakukan.

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL..... vi
DAFTAR BAGAN..... viii
DAFTAR DIAGRAM ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 1
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi..... 3
1.4 Isu- isu Strategis..... 11
1.5 Sistematika Penulisan..... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja..... 13
2.2 Perjanjian Kinerja..... 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja 28
3.2 Realisasi Anggaran..... 58
IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 66
Lampiran..... 68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial PPPA Tahun 2024 16
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2024 20
Tabel 2.3 Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2024..... 21
Tabel 2.4 Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2024..... 27
Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 28
Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, dan 2022..... 31
Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra..... 37
Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra..... 38
Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional..... 41
Tabel 3.1.5 Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja..... 42
Tabel 3.1.6 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya..... 44
Tabel 3.1.7 Analisis program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan..... 46
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024..... 58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi..... 8
Bagan 2. Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial PPPA 22
Bagan 3. Crosscutting Kinerja Dinas Sosial PPPA 22
Bagan 4. Cascading Kinerja Dinas Sosial PPPA 24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kelompok Jabatan..... 9
Diagram 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut selalu melakukan perbaikan kinerja sesuai dengan target yang telah di tentukan pada awal perencanaan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
12. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
d. Pembinaan Aparatur;
e. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
f. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran;
g. Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
h. Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian;
i. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
j. Pelaksanaan Fungsi Lain dang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Urusan Persuratan;
b. Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Kearsipan;
c. Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban Kantor;
d. Melaksanakan Pengelolaan Perlengkapan, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Melaksanakan Urusan Kepegawaian, Pembinaan Aparatur dan Administrasi Jabatan Fungsional;
f. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
g. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids (odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

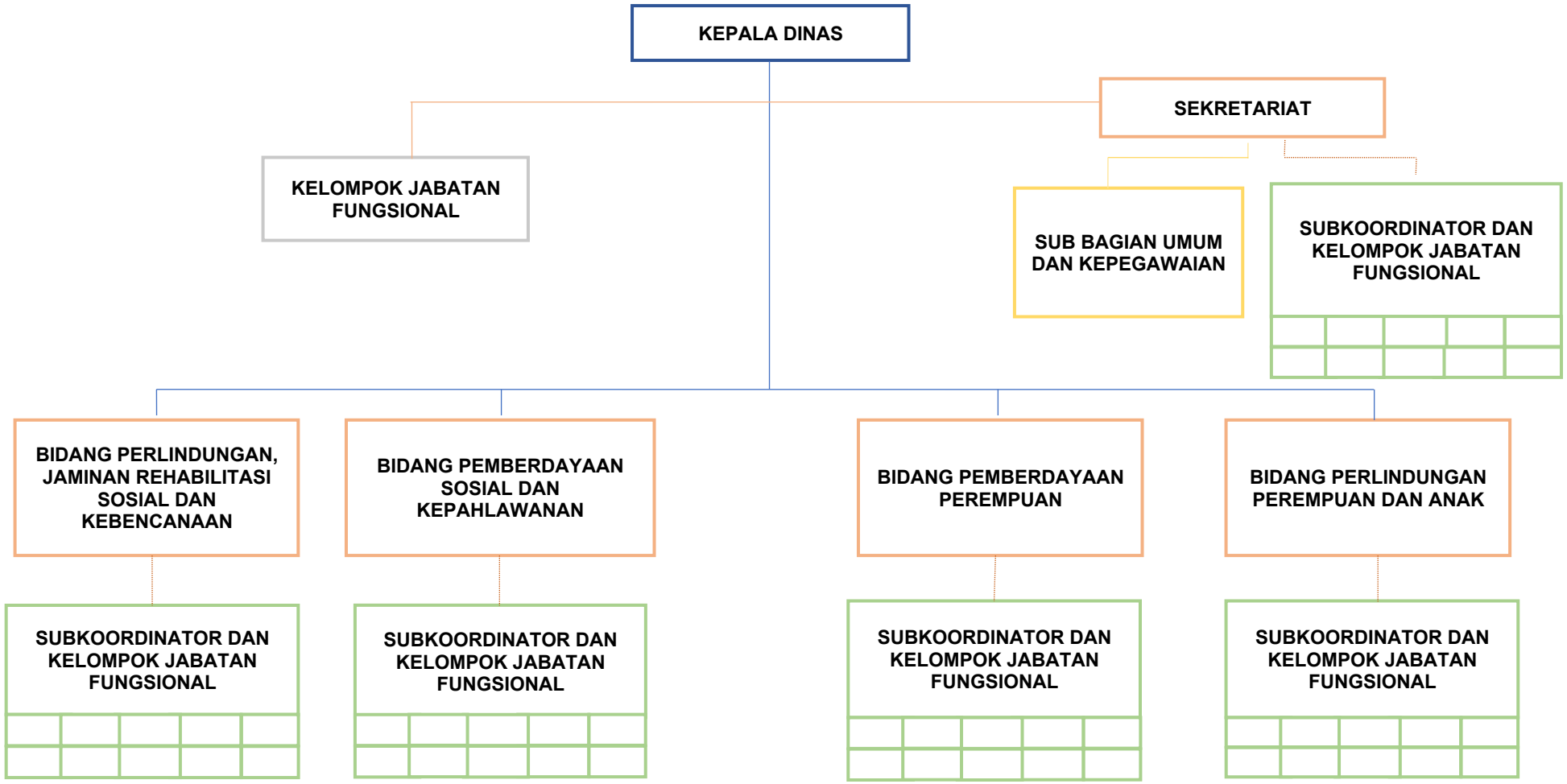
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAGAN 1.
SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3.3 Kelompok Jabatan

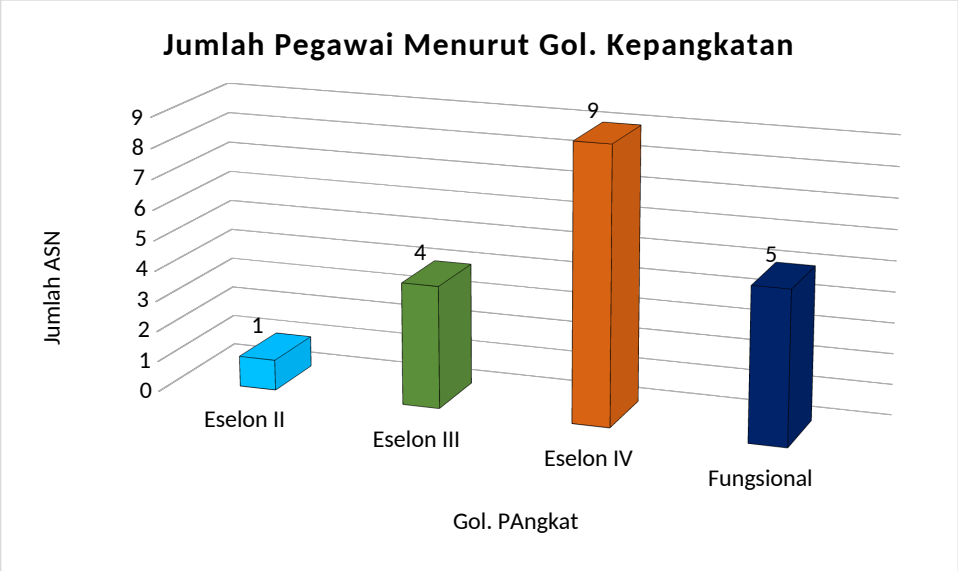
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk di tahun 2024, yakni:

a. Eselon II = 1 orang
b. Eselon III = 4 orang
c. Eselon IV = 9 orang
d. Fungsional = 5 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh aparatur sebanyak 19 orang dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Diagram 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan



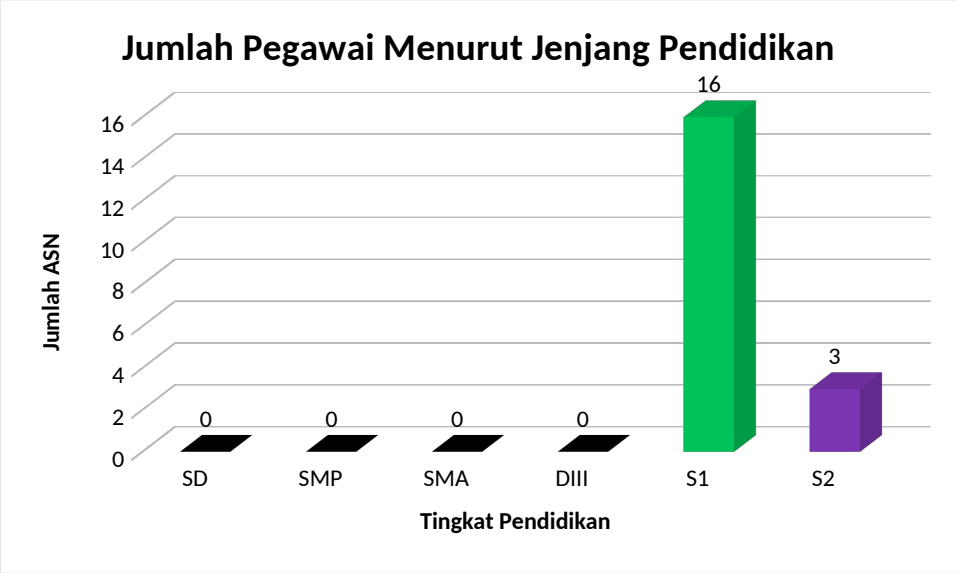
Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk

Kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Diagram 2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk

1.3.4 Aspek Strategis

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pelayanan dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Melaksanakan Penanganan dan Rehabilitasi bagi 26 PMKS/PPKS;
b. Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi 26 PMKS/PPKS;
c. Memberikan Bantuan Sosial kepada Lansia Miskin, Penyandang Disabilitas, Siswa Miskin dan LKSA;
d. Melaksanakan Bimtek bagi Operator SIKS-NG yang berkaitan dengan Verval Data;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Memberikan Bantuan Bahan Makan bagi PMKS/PPKS serta Korban Bencana Alam dan Sosial;
f. Melaksanakan Kegiatan Tagana Masuk Sekolah dan kampung Siaga Bencana
g. Melaksanakan Pelayanan bagi Masyarakat dalam Pengaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pengecekan DTKS
h. Melaksanakan Sosialisasi bagi Lembaga dan Instansi terkait Pemberian Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Uang Berhadiah;
i. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
j. Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
k. Meberikan bantuan Hibah bagi PMI dan WCC
l. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
m. Melaksanakan sosialisasi kepada organisasi perempuan dan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
n. Melaksanakan sosialisasi dan roadshow kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
o. Memberikan pendampingan, perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan

1.4 Isu - Isu Strategis Dinas Sosial PPPA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu adanya penentuan isu strategis terkiat permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah untuk pemberian pelayanan tepat sasaran yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Isu Strategis Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang harus ditangani terbagi dalam urusan, yaitu :

1. Isu Strategis Bidang Sosial

a. Adanya Verifikasi dan Validasi Data PPKS/ PMKS/ DTKS;
b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung PPKS/ PMKS;
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
d. Peran serta Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Penertiban Mekanisme Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) melalui Perluasan Sosialisasi Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Kapasitas dan Peran Perangkat daerah dalam Implementasi Gender;
c. Perlu Pembentukan UPT PPA;
d. Pembentukan Aplikasi Pengelolaan Data Gender dan Anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk selama tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
1.4 Isu-Isu Strategis Dinas Sosial PPPA
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja
1.2 Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA
3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 memaparkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sasaran indikator Kinerja Utama serta mengevaluasi dari sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

2.1 Ikhtisar/ Ringkasan Renstra/ Renja

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan terarah dapat selaras dengan visi misi yang dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 Tahun.

Pada hakekatnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana strategis yang berisi komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk melakukan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi pada Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Sebagaimana yang dituangkan pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 bahwa Visi Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

"Nganjuk yang Maju, Adil, dan Sejahtera"

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu misi ke-3, yaitu :

> *"Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyararakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, kecamatan, desa dan kelurahan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara efektif; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk gender. Di samping itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat semakin ditingkatkan, seperti layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja"*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 terdapat arah kebijakan umum Tahun 2024, yaitu :

"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM"

Berdasarkan arah kebijakan umum, maka Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu Tujuan ke-1, yaitu:

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup"

Sasaran Urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sasaran ke-4, yaitu:

"Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"

Sedangkan Urusan PPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu Tujuan ke-2, yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"

Sasaran Urusan PPPA yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sasaran ke-3, yaitu:

"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender"

Sebagaimana sasaran yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk diukur melalui sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yaitu dengan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dijabarkan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan serta sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 1 (satu) Tahun kedepan (2024-2026), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahtera an sosial.
Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau	Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap
Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kapasitas PSKS	Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat
Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial	
Menyusun,mereview,mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak
Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak
Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian	
Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	
Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak	
Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.	
Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	
Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keberhasilan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 2 Urusan dengan didukung alokasi anggaran Rp21.746.324.150,- antara lain :

Urusan Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemberdayaan Sosial

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Perempuan

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1 Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a. Mengurangi Penduduk Miskin

b. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (Tahunan, Semesteran, Tribulanan, atau Bulanan). Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**		**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**
1		Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2			Persentase jumlah PSKS yang aktif
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**
1		Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
2			Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya
3			Skor Kabupaten Layak Anak

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial PPPA

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan mencakup 2 tujuan dan 2 sasaran untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Keempat sasaran tersebut dilaksanakan dalam 2 urusan yaitu, Urusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0.5**	**0,46**	**108.69**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	72.50	74.69	103.02
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**70.50**	**72.46 (Tahun 2023)**	**102.78**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33.33	100	300.03
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	0	0

2.1.2 Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rencana kerja memuat rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Berikut disampaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kerangka Logis dan Cacading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, sebagai berikut:

Bagan 2.

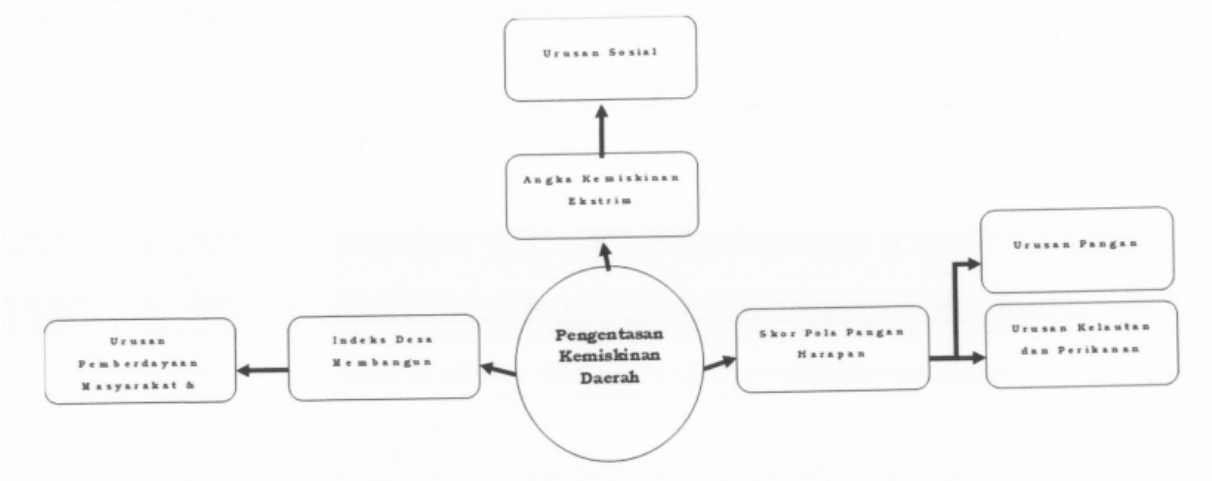
Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bagan 3.

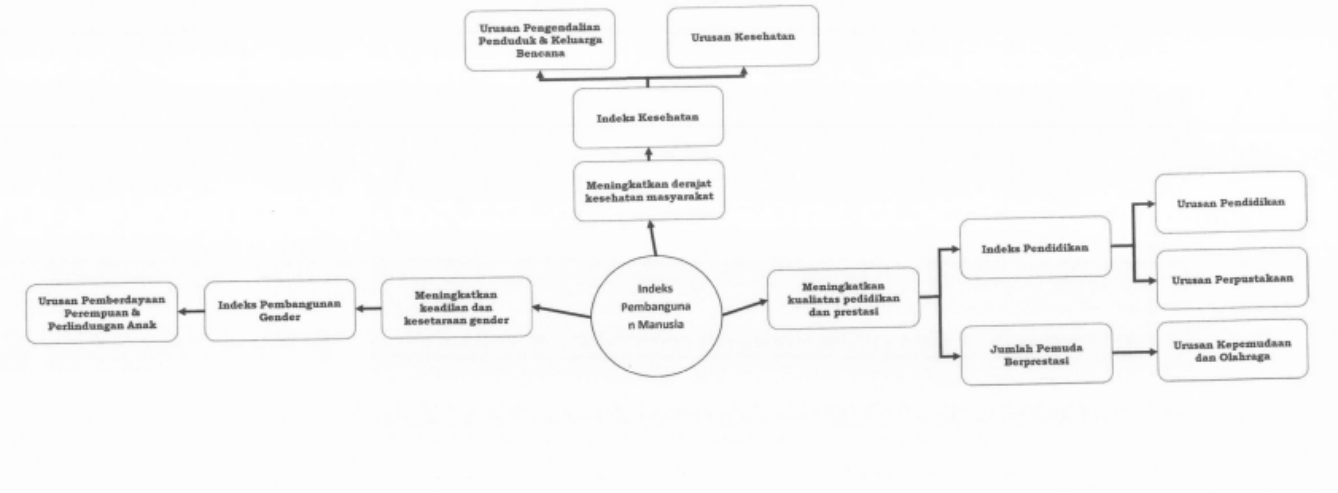
Crosscutting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Urusan Sosial



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

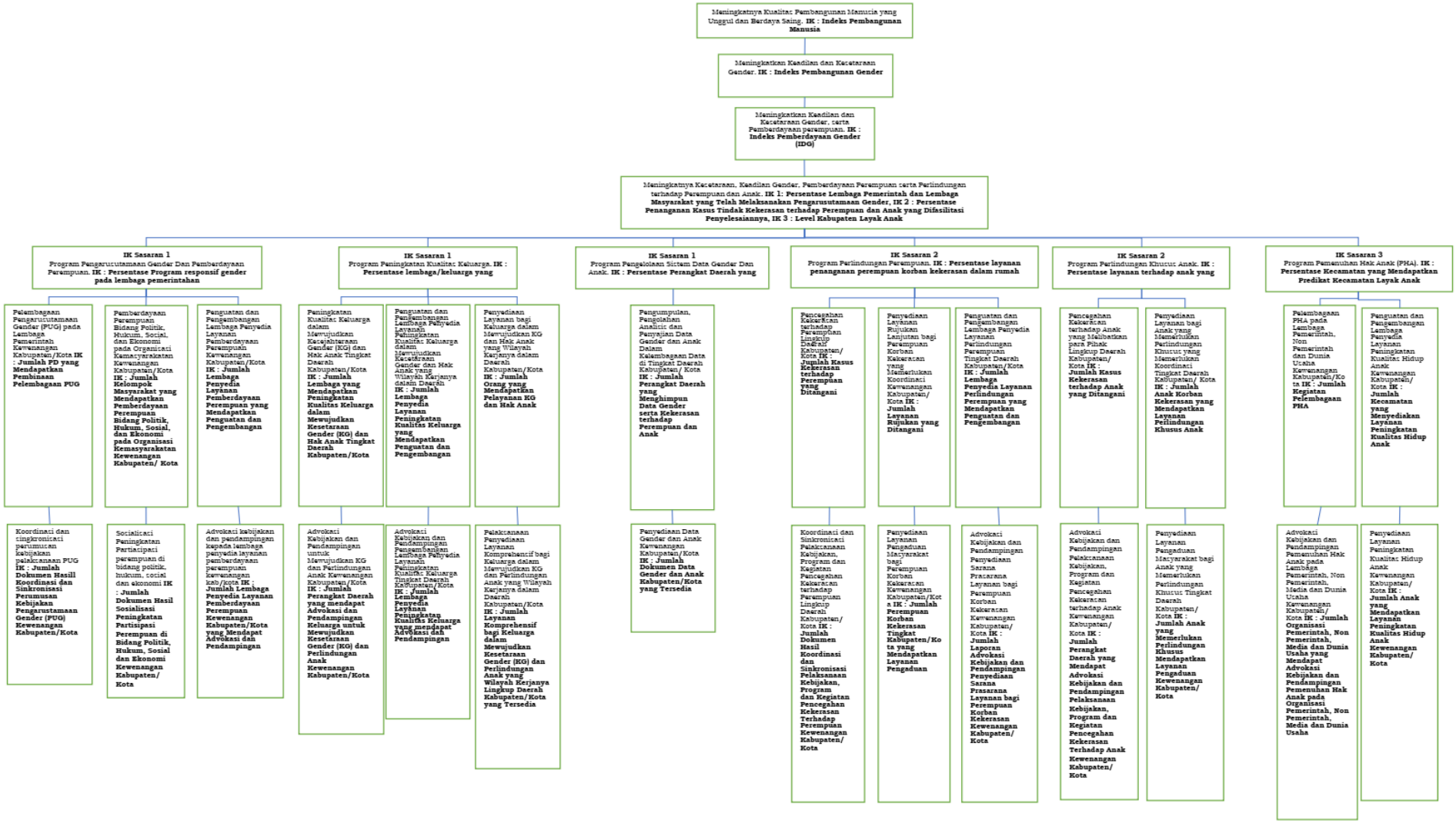
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

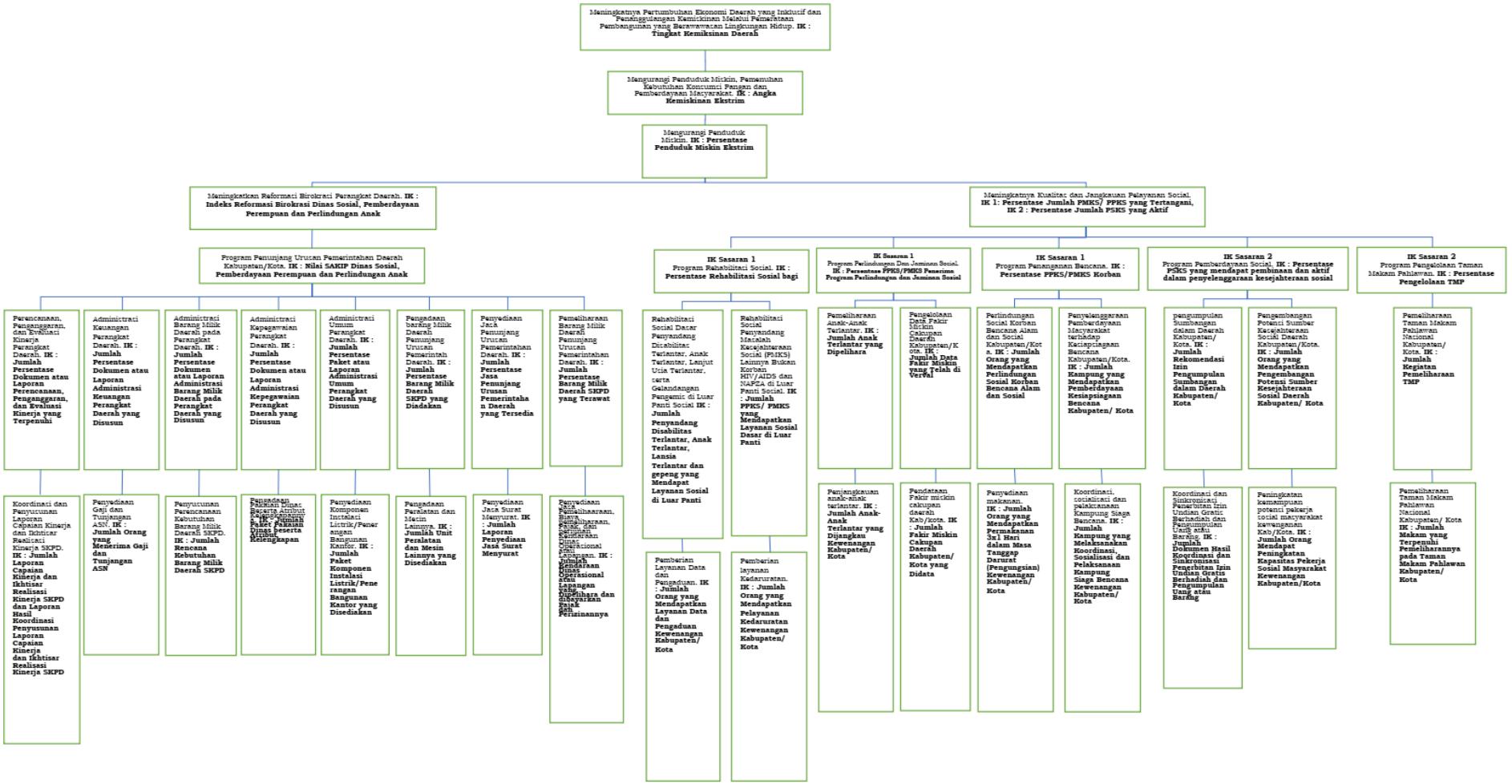
Bagan 4. Cascading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Urusan Sosial



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tingkat keberhasilan kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan ditetapkan dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan dan bawahan dalam pemberian tanggungjawab kinerja . Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah.

2.2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2024

Sasaran kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan sasaran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.2.2 Standart Penilai Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dengan indikator Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana, sedangkan indikator Persentase jumlah PSKS yang aktif didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dengan indikator Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, indikator Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya didukung oleh Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak, sedangkan Indikator Skor Kabupaten Layak Anak didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.4 Sasaran Urusan Sosial dan PPPA Dinas Sosial PPPA Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	72.50
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33.33
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp5,177,843,900.00	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp366,882,750.00	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp2,427,208,200.00	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp12,089,917,200.00	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp340,937,450.00	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp70,037,750.00	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp340,860,000.00	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp222,826,800.00	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp145,971,050.00	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp18,530,000.00	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp372,324,650.00	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp172,984,400.00	DAU - APBD
Jumlah Total		**Rp21,746,324,150.00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada pelaksanaan Program pembangunan pemerintah dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditentukan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis terhadap capaian indikator kinerja sebagai berikut:

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0.5**	**0,46**	**108.69**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	72.50	74.69	103.02
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**70.50**	**72.46 (Tahun 2023)**	**102.78**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33.33	100	300.03
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Penyelesaiannya			
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	0	0

Analisis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1 ” **Mengurangi Penduduk Miskin ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

- Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 5.347 Orang
- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 1.152.575 Orang
- Jumlah Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 0,46%
- Target Renstra Tahun 2024 0,5%
- Capaian Kinerja Tahun 2024 108,69%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 108,69% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 0,5%.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2024 100%
- Target Renstra Tahun 2024

  100 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 100%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Persentase jumlah PSKS yang aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2024 490 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2024 366 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2024 74,69 %
- Target Renstra Tahun 2024 72,5 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 103,02 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 103,02% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 72,5%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan ke-2 ” **Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Hasil Prosentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 belum disediakan. Berdasarkan pendataan tersebut diperoleh realisasi sebesar 72,46 dengan 102,78% sehingga sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **“Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

- Jumlah Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Jumlah Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Target Renstra Tahun 2024 — 33,33 %
- Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 — 100 %

  (∑ Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk / ∑ Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender x 100%)
- Capaian kinerja indikator Tahun 2024 — 300,03 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 300,03% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 33.33%.

Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 78 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2024 — 78 kasus
- Target Renstra Tahun 2024 — 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2024 — 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Skor Kabupaten Layak Anak

- Jumlah Kabupaten Tahun 2024 — 1 Kab.
- Jumlah Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 — 0
- Target Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 — (650) Madya
- Realisasi Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 — 0
- Capaian kinerja Tahun 2024 — 0

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 0% masuk dalam katagori tidak tercapai dari target yang ditentukan sebesar (650) Madya. Hal ini disebabkan karena penilaian KLA dilakukan N+1.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024, Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)			Realisasi Kinerja (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**1.11**	**0.46**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	94	95	100	99.26	99.79	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	60	65	72.50	71.40	75.35	74.69
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**71**	**72**	**70.50**	**69.78 (BPS Tahun 2021)**	**70.87 (BPS Tahun 2022)**	**72,46 (Tahun 2023)**
1	Meningkatnya	Persentase	0	0	33.33	0	0	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap	Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender						
2	Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	0	0	(650) Madya	0	0	0

Analisis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1 ” **Mengurangi Penduduk Miskin ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

- Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 5.347 Orang
- Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2023 12.734 Orang
- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 1.152.575 Orang
- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 1.139.617 Orang
- Jumlah Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 0,46%
- Jumlah Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2023 1,11%
- Target Renstra Tahun 2024 0,5%
- Target Renstra Tahun 2023 0%
- Capaian Kinerja Tahun 2024 108,69%
- Capaian Kinerja Tahun 2023 0%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 108,69% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 0,5%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan capain 0%, hal ini disebabkan pada tahun 2023 Tujuan Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengampu terkait Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2023 56.610 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2023 56.493 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2024 100%
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2023 99,79%
- Target Renstra Tahun 2024 100%
- TargetRenstraTahun2023 95%
- Capaian Kinerja Tahun 2024 100%
- Capaian Kinerja Tahun 2023 105,04%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi penanganan PMKS/PPKS tahun 2023 ada sedikit kenaikan sebesar 0,21% yaitu dari 99,79% menjadi 100% dan capaian untuk kinerjanya turun sebesar 5,04% dari 105,04% menjadi 100% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2024 490 Orang
- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2023 487 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2024 366 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2023 367 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2024 74,69 %
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2023 75,35%
- Target Renstra Tahun 2024 72,5%
- Target Renstra Tahun 2023 65 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 103,02 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 115,92 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 103,02 % masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 72,5%. Bila dibandingkan dengan realisasi penanganan PMKS/PPKS tahun 2023 ada sedikit penurunan sebesar 0,66% yaitu dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

75,35% menjadi 74,69% dan capaian untuk kinerjanya turun sebesar 12,9% dari 115,92% menjadi 103,02% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Pada urusan sosial rata-rata menghasilkan nilai capaian di atas 101,51% dan berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “tercapai” kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil menekan bertambahnya PMKS/PPKS serta meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sebagaimana yang ditargetkan dalam renstra.

Tujuan ke-2 ” **Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Hasil Prosentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 belum disediakan. Berdasarkan pendataan tersebut diperoleh realisasi sebesar 72,46 dengan 102,78% sehingga sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **“Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

- Jumlah Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Jumlah Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Target Renstra Tahun 2024 — 33,33 %
- Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 — 100 %

(∑ Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk / ∑ Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender x 100%)

- Capaian kinerja indikator Tahun 2024 — 300,03 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 300,03% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 33,33%. Sedangkan Indikator Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

”Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat”, diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah ASN se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 7.550 orang
- Jumlah ASN Perempuan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 4.341 orang
- Jumlah ASN Laki-Laki se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 3.209 orang
- Jumlah Jabatan Struktural yang ada Tahun 2023 — 369 jabatan
- Jumlah ASN perempuan se Kabupaten Nganjuk yang Menduduki jabatan struktural Tahun 2023 — 130 orang
- Target Renstra Tahun 2023 — 45 %
- Persentase ASN perempuan yang menduduki Jabatan struktural Tahun 2023 — 35 %

(∑ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / ∑ Jabatan Struktural yang ada x 100%)

- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 — 77,77 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,77% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 45%.

Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

Indikator ini menggambarkan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang pada umumnya terjadi pada perempuan maupun anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kasus penelantaran serta lainnya.

Data dan capaian Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 78 Kasus
- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2023 — 76 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2024 — 78 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2023 — 76 Kasus
- Target Renstra Tahun 2024 — 100%
- Target Renstra Tahun 2023 — 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 100 %
- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2023 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2024 — 100 %
- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 — 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya Tahun 2023 sama sebesar 100% yaitu dari 100% menjadi 100% dan capaian untuk kinerjanya tetap sama dari 100% menjadi 100% tetapi masih di atas target yang ditentukan.

Skor Kabupaten Layak Anak

Terdapat perubahan pada indikator sasaran Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, sehingga pada Tahun 2024 belum dapat menampilkan perbandingan indikator sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Nilai Kabupaten Layak Anak belum dapat ditampilkan karena Penilaian Kabupaten Layak dilakukan 2 Tahun sekali, indikator ditetapkan sebelum adanya pemberitahuan bahwa penilaian dilakukan 2 Tahun sekali. Hal ini menjadi koreksi bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengevaluasi indikator tersebut. Sedangkan Indikator Tahun 2023 ”Persentase Kecamatan Layak Anak”, diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk Th. 2023 — 20 Kec.
- Jumlah Kecamatan yang sudah Mempunyai SK Gugus Tugas Layak Anak Tahun 2023 — 11 Kecamatan
- Target Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 15 %
- Persentase Kecamatan Layak Anak Th. 2023 — 55 %
- Capaian kinerja Th. 2023 — 366,66 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 366,66% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 15%.

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tertuang dalam sasaran menghasilkan nilai capaian sebesar 133,34% berdasarkan skala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori “tercapai”.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0,5**	**0,3**	**0,1**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	72,50	73,00	74,00
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**70,50**	**71,00**	**71,25**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33,33	42,26	51,19
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama

Tabel di atas merupakan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 3 Tahun sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mengampu 2 tujuan dan 2 sasaran berdasarkan 2 urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0,1**	**0.46**	**21.73**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	74,00	74,69	100,93
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**71,25**	**72,46 (Tahun 2023)**	**101,70**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	51,19	100	195,35
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(850) Utama	0	0

Analisis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan ke-1 ” **Mengurangi Penduduk Miskin ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

- Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 5.347 Orang
- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 1.162.575 Orang
- Jumlah Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2024 0,46%
- Target Akhir Renstra 0.1%
- Capaian Kinerja Akhir Renstra 21.73%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 21.73% masuk dalam katagori tidak tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 0,1% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 0.46%. Hal ini disebabkan pada akhir Tahun Renstra target yang ditentukan semakin kecil dengan harapan penduduk miskin ekstrim dari tahun ke tahun berkurang.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **“ Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani :

- Jumlah PMKS/ PPKS Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani Tahun 2024 57.158 Orang
- Jumlah Persentase PMKS/ PPKS yang ditangani th.2024 100%
- Target Akhir Renstra 100%
- Capaian Kinerja Akhir Renstra 100%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 100% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100%.

Persentase jumlah PSKS yang aktif

- Jumlah PSKS yang ada Tahun 2024 490 Orang
- Jumlah PSKS yang aktif Tahun 2024 366 Orang
- Persentase Jumlah PSKS yang Aktif Tahun 2024 74,69 %
- Target Akhir Renstra 74,00%
- Capaian Kinerja Akhir Renstra 100,93%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100,93% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 74% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 74,69%.

Tujuan ke-2 ” **Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan ”** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil Prosentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 belum disediakan. Berdasarkan pendataan tersebut diperoleh realisasi sebesar 72,46 bila disandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 71,25 terdapat capaian sebesar 101,70% sehingga masuk dalam kategori tercapai.

Berdasarkan tujuan di atas maka Sasaran ke-1 **"Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"** diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

- Jumlah Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Jumlah Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Target Akhir Renstra — 51,19%
- Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 — 100 %
  (∑ Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk / ∑ Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender x 100%)
- Capaian Akhir Renstra — 195,35%

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 195,35% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 51,19% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100%.

Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

- Jumlah kasus kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 78 Kasus
- Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan Tahun 2024 — 78 kasus
- Target Akhir Renstra — 100%
- Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi Tahun 2024 — 100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Capaian kinerja Inidkator akhir Renstra 100 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 100% masuk dalam katagori tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan sebesar 100% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100%.

Skor Kabupaten Layak Anak

- Jumlah Kabupaten Tahun 2024 1 Kab.
- Jumlah Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 0
- Target Skor Kabupaten Layak Anak Akhir Renstra (850) Utama
- Realisasi Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 0
- Capaian kinerja Akhir Renstra 0

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 0% masuk dalam katagori tidak tercapai dari target akhir tahun renstra yang ditentukan nilai sebesar **(850) Utama** dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 0%. Hal ini disebabkan penilaian KLA pada saat ini dilakukan N+1.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Level Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)
			Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun	
1	2	3		4	5
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0.66**	**-**	**0.46**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	-	-	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	-	-	74.69
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**74.90 (Tahun 2023)**	**70.23 (Tahun 2023)**	**72.46 (Tahun 2023)**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	-	-	100
2		Persentase Penanganan	-	-	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya			
3		Skor Kabupaten Layak Anak	-	-	0

Berdasarkan realisasi tingkat daerah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk terdapat 2 tujuan dengan realisasi sebesar 0.46% dan 72.46 (Tahun 2023). Pada realisasi Tingkat Nasional yaitu Provinsi Jawa Timur terdapat Penduduk Miskin ekstrim sebesar 0.66% dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74.90 (Tahun 2023). Jika dibandingkan dengan Tingkat Daerah maka tujuan tersebut memiliki selisih 0.2% untuk Penduduk Miskin Ekstrim sedangkan 2.44 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pada realisasi Tingkat Nasional yaitu Kabupaten Madiun terdapat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70.23 (Tahun 2023). Jika dibandingkan dengan Tingkat Daerah sebesar 72.46 maka tujuan tersebut memiliki selisih 2.23%.

A.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**108.69**	**Tercapai**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	Tercapai
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	103,02	Tercapai
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**102,78**	**Tercapai**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	300,03	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2	Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	Tercapai
3		Skor Kabupaten Layak Anak	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel 3.1.5, adapun penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran *"Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"* sebagai berikut:

a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS/PPKS
b. Pemberian bantuan sosial untuk Lansia Miskin, Siswa Miskin dan 22 LKSA
c. Penyediaan permakanan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan melalui pemberian bantuan shelter dan logistik lainnya bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
d. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian gratis berhadiah,
e. Peningkatan kemampuan bagi TKSK, PSM dan Karang Taruna. Serta upaya pembinaan dan penindakan terhadap para penyelenggaraan pembinaan warakawuri keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan pemberian santunan bagi veteran. Koordinasi dalam pelaksanaan Renungan suci, Tabur Bunga Dan Ziarah Pahlawan

Penunjang pencapaian kinerja sasaran *"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"* sebagai berikut

b. Pemahaman tentang Pelaksanaan dan Penerapan Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sebagai penunjang penilaian APE Kabupaten Nganjuk.
c. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami karena sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana cara melaporkan tindak kekerasan yang dialami.
d. Terbentuknya UPT.PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan perempuan dan anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Penailaian Skor Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk yang belum tersedia dikarenakan penilaian dilakukan 2 Tahun sekali.

A.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
A	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**10.14**	**93.96**	**(83.82)**
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	94.73	5.27
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	103.02	97.29	5.73
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**102.78**	**94.62**	**8.16**
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	300.03	94.95	205.08
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	95.78	4.22
3		Skor Kabupaten Layak Anak	0	95.67	(95.67)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator Sasaran : Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani

Indikator sasaran di atas didukung oleh 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.035.906.750,- terealisasi sebesar Rp. 18.807.803.392,- atau 93,87%.

Indikator Sasaran : Persentase jumlah PSKS yang aktif

Indikator sasaran di atas didukung oleh 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp436.920.500,- terealisasi sebesar Rp428.049.650,- atau 97,97%.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

Indikator sasaran di atas didukung oleh 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp505.361.050,- terealisasi sebesar Rp470.587.632,- atau 93,12%.

Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya

Indikator sasaran di atas didukung oleh 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan, dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp395.811.200,- terealisasi sebesar Rp378.166.591,- atau 95,54%.

Indikator Sasaran : Skor Kabupaten Layak Anak

Indikator sasaran di atas didukung oleh 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp372.324.650,- terealisasi sebesar Rp356.207.194,- atau 95,67%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A.7 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.1.7

Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
A	Mengurangi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																
			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**77**	**Nilai**	**78**	**Nilai**	**79**	**Nilai**	**78.35**	**Nilai**	**0.00**	**Nilai**	**0.00**	**Nilai**	**102%**	**0%**	**0%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/ Bulan	24	Orang/ Bulan	24	Orang/ Bulan	19	Orang/ Bulan	0.00	Orang/ Bulan	0.00	Orang/ Bulan	100%	0%	0%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	2	Orang	2	Orang	40	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	100%	0%	0%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	12	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	100%	0%	0%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	12	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	100%	0%	0%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	12	Paket	0.00	Paket	0.00	Paket	100%	0%	0%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	12	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Unit	1	Unit	1	Unit	36	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46	Unit	2	Unit	2	Unit	46	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	36	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	100%	0%	0%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**77**	**%**	**78**	**%**	**79**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**130%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	30	Unit	30	Unit	31	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	50	Unit	50	Unit	3	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	25	Unit	25	Unit	50	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	3	Unit	3	Unit	5	Unit	0.00	Unit	0.00	Unit	100%	0%	0%
		Persentase jumlah PSKS yang aktif	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**49.87**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**59%**	**0%**	**0%**
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0%**	**0%**	**0%**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0%	0%	0%
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**99.73**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**117%**	**0%**	**0%**
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100	Orang	100	Orang	80	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	80%	0%	0%
			Peningkatan Kemampuan	Jumlah Tenaga	20	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	0.0	Orang	0.0	Orang	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota									0		0				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Lembaga	50	Lembaga	50	Lembaga	72	Lembaga	0.00	Lembaga	0.00	Lembaga	90%	0%	0%
		Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**70.05**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**82%**	**0%**	**0%**
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**58.06**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**68%**	**0%**	**0%**
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Orang	125	Orang	130	Orang	66	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	53%	0%	0%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420	Orang	430	Orang	435	Orang	351	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	84%	0%	0%
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	325	Orang	350	Orang	355	Orang	48	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	15%	0%	0%
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85**	**%**		**%**		**%**	**82.03**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**97%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1330	Orang	1121	Orang	1230	Orang	730	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	55%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	95	Orang	110	Orang	120	Orang	103	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	108%	0%	0%
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang	26	Orang	30	Orang	18	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	75%	0%	0%
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	22	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	22	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**99.87**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**117%**	**0%**	**0%**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**99.87**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**117%**	**0%**	**0%**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	214.620	Keluarga	198.839	Keluarga	186.804	Keluarga	214,620	Keluarga	0.00	Keluarga	0.00	Keluarga	100000%	0%	0%
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8,123	Keluarga	5.200	Keluarga	4.800	Keluarga	7,891	Keluarga	0.00	Keluarga	0.00	Keluarga	97%	0%	0%
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**93.19**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**110%**	**0%**	**0%**
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**86.37**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**102%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	550	Orang	100	Orang	100	Orang	375	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	68%	0%	0%
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**118%**	**0%**	**0%**
			Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang	68	Orang	18	Orang	18	Orang	72	Orang	0.0	Orang	0.0	Orang	106%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									0		0				
		Persentase jumlah PSKS yang aktif	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**118%**	**0%**	**0%**
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP**	**85**	**%**	**85**	**%**	**85**	**%**	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**118%**	**0%**	**0%**
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	560	Makam	562	Makam	564	Makam	560	Makam	0.00	Makam	0.00	Makam	100%	0%	0%
B	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	**Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**105.25**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**105%**	**0%**	**0%**
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**99.99**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**100%**	**0%**	**0%**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	42	Perangkat Daerah	43	Perangkat Daerah	45	Perangkat Daerah	42	Perangkat Daerah	0.00	Perangkat Daerah	0.00	Perangkat Daerah	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan			Realisasi Program/Kegiatan			Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	0.00 Perangkat Daerah	0.00 Perangkat Daerah	100%	0%	0%
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100 100%**	**100 %**	**100 %**	**99.99 100%**	**0.00 100%**	**0.00 100%**	**100%**	**0%**	**0%**
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	100%	0%	0%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Organisasi	65 Organisasi	65 Organisasi	65 Organisasi	0.00 Organisasi	0.00 Organisasi	100%	0%	0%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**115.78 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**116%**	**0%**	**0%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	65 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	0.00 Lembaga	0.00 Lembaga	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan															
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2,300	Orang	1,725	Orang	1,725	Orang	2675	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	116%	0%	0%
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**62.43**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**62%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**24.85**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**25%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370	Orang	370	Orang	370	Orang	92	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	25%	0%	0%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**100%**	**0%**	**0%**
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	8	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
		Persentase Lembaga	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**82.19**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**82%**	**0%**	**0%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
		Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender		**Mendapat Layanan Responsif Gender**															
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**98.07**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**98%**	**0%**	**0%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Perangkat Daerah	50	Perangkat Daerah	50	Perangkat Daerah	52	Perangkat Daerah	0.00	Perangkat Daerah	0.00	Perangkat Daerah	104%	0%	0%
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0.00	Laporan	0.00	Laporan	0%	0%	0%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**50.49**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**50%**	**0%**	**0%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50	Lembaga	50	Lembaga	50	Lembaga	0	Lembaga	0.00	Lembaga	0.00	Lembaga	0%	0%	0%
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	0.00	Orang	0.00	Orang	100%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan						Realisasi Program/Kegiatan						Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14
				Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**98.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**98%**	**0%**	**0%**
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Layanan	110	Layanan	120	Layanan	98	Layanan	0.00	Layanan	0.00	Layanan	98%	0%	0%
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**99.99**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**100%**	**0%**	**0%**
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**99.99**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**100%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	Dokumen	100%	0%	0%
		Skor Kabupaten Layak Anak	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**116.65**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**117%**	**0%**	**0%**
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**116.65**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**%**	**117%**	**0%**	**0%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	1	Organisasi		Organisasi		Organisasi	2	Organisasi	0.00	Organisasi	0.00	Organisasi	200%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/Kegiatan			Realisasi Program/Kegiatan			Capaian Kinerja Program/Kegiatan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	100%	0%	0%
		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**52.22 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**52%**	**0%**	**0%**
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**0%**	**0%**	**0%**
			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0%	0%
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**46.67 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**47%**	**0%**	**0%**
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	55 Orang	55 Orang	59 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	197%	0%	0%
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	3 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	3%	0%	0%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**110.00 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**110%**	**0%**	**0%**
			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11 Kegiatan	0.00 Kegiatan	0.00 Kegiatan	110%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2 Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**21,746,324,150**	**20,440,814,459**	**1,305,509,691**	**94.00%**
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**20,472,827,250**	**19,235,853,042**	**1,236,974,208**	**93.96%**
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**20,472,827,250**	**19,235,853,042**	**1,236,974,208**	**93.96%**
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5,177,843,900**	**4,960,667,569**	**217,176,331**	**95.81%**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59,452,000**	**54,630,125**	**4,821,875**	**91.89%**
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,715,000	43,919,475	4,795,525	90.16%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,737,000	10,710,650	26,350	99.75%
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,569,991,000**	**3,401,577,449**	**168,413,551**	**95.28%**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,199,698,000	3,037,070,252	162,627,748	94.92%
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354,903,000	350,384,197	4,518,803	98.73%
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,966,000	6,359,500	606,500	91.29%
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8,424,000	7,763,500	660,500	92.16%
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**54,500,000**	**53,500,000**	**1,000,000**	**98.17%**
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54,500,000	53,500,000	1,000,000	98.17%
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**293,439,400**	**288,548,735**	**4,890,665**	**98.33%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,442,500	8,432,500	10,000	99.88%
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125,977,600	124,889,204	1,088,396	99.14%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,596,850	53,580,600	16,250	99.97%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,280,000	120,000	95.00%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59,387,700	55,752,031	3,635,669	93.88%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,634,750	43,614,400	20,350	99.95%
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**264,955,800**	**241,338,604**	**23,617,196**	**91.09%**
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	113,694,850	95,820,504	17,874,346	84.28%
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,260,950	145,518,100	5,742,850	96.20%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**428,200,000**	**414,248,067**	**13,951,933**	**96.74%**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,720,000	1,720,000	-	100.00%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,100,000	102,656,003	13,443,997	88.42%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310,380,000	309,872,064	507,936	99.84%
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**507,305,700**	**506,824,589**	**481,111**	**99.91%**
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236,949,800	236,661,831	287,969	99.88%
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1,455,000	1,454,000	1,000	99.93%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,750,000	13,736,000	14,000	99.90%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255,150,900	254,972,758	178,142	99.93%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**366,882,750**	**360,609,750**	**6,273,000**	**98.29%**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan**	**13,961,700**	**12,409,200**	**1,552,500**	**88.88%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
	dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13,961,700	12,409,200	1,552,500	88.88%
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**352,921,050**	**348,200,550**	**4,720,500**	**98.66%**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16,234,100	14,927,100	1,307,000	91.95%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	250,274,900	249,839,900	435,000	99.83%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86,412,050	83,433,550	2,978,500	96.55%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2,427,208,200**	**2,375,312,174**	**51,896,026**	**97.86%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1,058,064,800**	**1,048,423,588**	**9,641,212**	**99.09%**
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	37,216,800	36,224,800	992,000	97.33%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	536,500,000	528,745,000	7,755,000	98.55%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	484,348,000	483,453,788	894,212	99.82%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**1,369,143,400**	**1,326,888,586**	**42,254,814**	**96.91%**
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	414,540,450	374,782,270	39,758,180	90.41%
1.06.04.2.02.000	Pemberian Bimbingan Fisik,	167,502,950	166,485,316	1,017,634	99.39%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
7	Mental, Spiritual, dan Sosial				
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000	3,700,000	1,300,000	74.00%
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	782,100,000	781,921,000	179,000	99.98%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**12,089,917,200**	**11,151,015,149**	**938,902,051**	**92.23%**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**12,089,917,200**	**11,151,015,149**	**938,902,051**	**92.23%**
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	209,562,300	149,191,363	60,370,937	71.19%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11,880,354,900	11,001,823,786	878,531,114	92.61%
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**340,937,450**	**320,808,500**	**20,128,950**	**94.10%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**71,553,650**	**70,740,500**	**813,150**	**98.86%**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	71,553,650	70,740,500	813,150	98.86%
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**269,383,800**	**250,068,000**	**19,315,800**	**92.83%**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	269,383,800	250,068,000	19,315,800	92.83%
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**70,037,750**	**67,439,900**	**2,597,850**	**96.29%**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**70,037,750**	**67,439,900**	**2,597,850**	**96.29%**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70,037,750	67,439,900	2,597,850	96.29%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**1,273,496,900**	**1,204,961,417**	**68,535,483**	**94.62%**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**	**340,860,000**	**308,574,000**	**32,286,000**	**90.53%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
	PEREMPUAN				
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**63,500,000**	**53,910,000**	**9,590,000**	**84.90%**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	7,200,000	3,732,000	3,468,000	51.83%
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	15,650,000	15,233,000	417,000	97.34%
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	34,650,000	29,162,000	5,488,000	84.16%
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	6,000,000	5,783,000	217,000	96.38%
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**18,200,000**	**18,078,000**	**122,000**	**99.33%**
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	8,200,000	8,160,000	40,000	99.51%
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10,000,000	9,918,000	82,000	99.18%
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**259,160,000**	**236,586,000**	**22,574,000**	**91.29%**
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9,500,000	9,433,000	67,000	99.29%
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	241,660,000	219,153,000	22,507,000	90.69%
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8,000,000	8,000,000	-	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**222,826,800**	**209,186,000**	**13,640,800**	**93.88%**
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**150,000,000**	**150,000,000**	**-**	**100.00%**
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	-	100.00%
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**72,826,800**	**59,186,000**	**13,640,800**	**81.27%**
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	72,826,800	59,186,000	13,640,800	81.27%
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**145,971,050**	**144,329,238**	**1,641,812**	**98.88%**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**55,899,700**	**55,246,094**	**653,606**	**98.83%**
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9,857,500	9,592,000	265,500	97.31%
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36,041,700	35,966,094	75,606	99.79%
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,500	9,688,000	312,500	96.88%
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**29,931,500**	**29,144,000**	**787,500**	**97.37%**
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	9,986,500	9,674,000	312,500	96.87%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,972,500	9,510,000	462,500	95.36%
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,972,500	9,960,000	12,500	99.87%
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**60,139,850**	**59,939,144**	**200,706**	**99.67%**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,139,850	59,939,144	200,706	99.67%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**18,530,000**	**17,684,394**	**845,606**	**95.44%**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**18,530,000**	**17,684,394**	**845,606**	**95.44%**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	11,000,000	10,943,394	56,606	99.49%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7,530,000	6,741,000	789,000	89.52%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**372,324,650**	**356,207,194**	**16,117,456**	**95.67%**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**372,324,650**	**356,207,194**	**16,117,456**	**95.67%**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	110,729,800	101,062,000	9,667,800	91.27%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
	Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	261,594,850	255,145,194	6,449,656	97.53%
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**172,984,400**	**168,980,591**	**4,003,809**	**97.69%**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**6,715,700**	**6,166,000**	**549,700**	**91.81%**
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	6,715,700	6,166,000	549,700	91.81%
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**73,467,500**	**70,369,591**	**3,097,909**	**95.78%**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,731,400	66,569,591	2,161,809	96.85%
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	4,736,100	3,800,000	936,100	80.23%
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**92,801,200**	**92,445,000**	**356,200**	**99.62%**
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	92,801,200	92,445,000	356,200	99.62%
Jumlah		**21,746,324,150**	**20,440,814,459**	**1,305,509,691**	**94.00%**

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp21.746.324.150,-** dan terealisasi sebesar **Rp20.440.814.459,-** dengan sisa sebesar **Rp1.305.509.691,-** atau **94,00%**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sisa tersebut dikarenakan ada beberapa hambatan, yaitu:

a. Keterbatasan waktu pada saat perubahan anggaran dan efesiensi anggaran, serta beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena situasi dan kondisi.
b. Kurang disiplinnya pengelola keuangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam mempertanggungjawabkan uang persediaan yang dikelola sehingga terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun
c. Input By Name By Addres di SIPD untuk bansos yang memakan banyak waktu sehingga kurang valid dan maksimal dalam penyaluran
d. Terlalu lamanya proses penerbitan SK untuk Bansos dan Hibah, sehingga berdampak pada penerima bansos yang meninggal atau tidak dapat tersalurkan
e. Keterbatasan waktu dan SDM untuk verval data sehingga masih ada beberapa nama penerima yang double data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Nganjuk, antara lain:

1. Tahun 2023 Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dapat mencapai dari target yang ditentukan pada awal perencanaan.
2. Terdapat 1 sasaran yang tidak dapat tercapai dikarenakan pada penilaian KLA yang pada saat perencanaan masih dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tetapi pada berjalannya waktu terdapat perubahan penilaian KLA yang dilaksanakan 2 Tahun sekali.
3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan kurang sinkron dengan indikator yang tercantum khususnya indicator pada program dan kegiatan, sehingga hal ini menjadi evaluasi Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun berikutnya.
4. Rp21.746.324.150,- dan terealisasi sebesar Rp20.440.814.459,- dengan sisa sebesar Rp1.305.509.691,- atau 94,00%.

a. Permasalahan:

1. Masih belum tercapainya target penurunan PMKS/PPKS sesuai target.
2. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

b. Solusi:

1. Perlu melakukan pendataan PMKS/PPKS untuk memperoleh data PMKS/PPKS yang valid
2. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.

Nganjuk, 20 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	Drs. DARMANTONO
Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a	:	SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si
Jabatan	:	Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pj. Bupati Nganjuk	Kepala Dinas Sosial,PPPA Kabupaten Nganjuk
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	**Drs. DARMANTONO**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	a. Persentase Jumlah PMKS / PPKS yang Tertangani	100 %
		b. Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	72,5 %
2	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	a. Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarustamaan Gender	33,33 %
		b. Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100 %
		c. Skor Kabupaten Layak Anak	650 (Madya)

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	5.255.285.500	DAU - APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp.	366.882.750	DAU - APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp.	2.195.326.950	DAU - APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	7.051.117.200	DAU - APBD
5	Penanganan Bencana	Rp.	340.937.450	DAU - APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	70.037.750	DAU - APBD
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	291.000.000	DAU - APBD
8	Perlindungan Perempuan	Rp.	222.826.800	DAU - APBD
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	145.831.050	DAU - APBD
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	18.530.000	DAU - APBD
11	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	349.760.450	DAU - APBD
12	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	167.784.400	DAU - APBD
Jumlah Total		Rp.	**16.475.320.300**	

Nganjuk, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial,PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp/Fax. (0358) 3550772 Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR :188/ 063 /K/411.304/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 02 Januari 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk



Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 063 /K/411.304/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Mengurangi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	PPMI = JPMI x 100% / JPI	BPS	Dinas Sosial PPPA
2	Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	BPS	Dinas Sosial PPPA

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK				**21,746,324,150.00**	**20,440,814,459.00**	**1,305,509,691.00**		**21,746,324,150.00**	**20,440,814,459.00**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**20,472,827,250.00**	**19,235,853,042.00**	**1,236,974,208.00**		**20,472,827,250.00**	**19,235,853,042.00**		
1.06	**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**			**20,472,827,250.00**	**19,235,853,042.00**	**1,236,974,208.00**		**20,472,827,250.00**	**19,235,853,042.00**		
1.06 . 01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***			**5,177,843,900.00**	**4,960,667,569.00**	**217,176,331.00**		**5,177,843,900.00**	**4,960,667,569.00**		
1.06 . 01 . 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**TRUE**		**59,452,000.00**	**54,630,125.00**	**4,821,875.00**		**59,452,000.00**	**54,630,125.00**		
1.06 . 01 . 2.01 . 0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	48,715,000.00	43,919,475.00	4,795,525.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	48,715,000.00	43,919,475.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Laporan	
							Hasil : Terwujudnya Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	90.16	%	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	10,737,000	10,710,650.00	26,350.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	10,737,000	10,710,650.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Laporan	
							Hasil : Terwujudnya Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	99.75	%	
1.06 . 01 . 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**3,569,991,000.00**	**3,401,577,449.00**	**168,413,551.00**		**3,569,991,000.00**	**3,401,577,449.00**		
1.06 . 01 . 2.02 . 0001	*Penydiaan gaji dan Tunjangan ASN*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	3,199,698,000.00	3,037,070,252.00	162,627,748.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	3,199,698,000.00	3,037,070,252.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	orang/ bulan	
							Hasil : Terwujudnya Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100	94.92	%	
1.06 . 01 . 2.02 . 0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	354,903,000.00	350,384,197.00	4,518,803.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	354,903,000.00	350,384,197.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Dokumen atau Laporan administrasi keuangan	100	96.16	%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN					KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN		RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							Perangkat Daerah yang disusun					
1.06 . 01 . 2.02 . 0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	6,966,000.00	6,359,500.00	606,500.00	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	6,966,000.00	6,359,500.00	Rp	
							Keluaran	: Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	
							Hasil	: Terwujudnya Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100	91.29	%	
1.06 . 01 . 2.02 . 0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	8,424,000.00	7,763,500.00	660,500.00	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	8,424,000.00	7,763,500.00	Rp	
							Keluaran	: Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Daerah yang Disusun	18	18	Laporan	
							Hasil	: Terwujudnya Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100	92.16	%	
1.06 . 01 . 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			**54,500,000.00**	**53,500,000.00**	**1,000,000.00**			**54,500,000.00**	**53,500,000.00**		
1.06 . 01 . 2.05 . 0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	54,500,000.00	53,500,000.00	1,000,000.00	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	54,500,000.00	53,500,000.00	Rp	
							Keluaran	: Terlaksananya Dokumen Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	40	Orang	
							Hasil	: Terwujudnya Dokumen Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	100	98.17	%	
1.06 . 01 . 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**293,439,400.00**	**288,548,735.00**	**4,890,665.00**			**293,439,400.00**	**288,548,735.00**		
1.06 . 01 . 2.06 . 0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	8,442,500.00	8,432,500.00	10,000.00	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	8,442,500.00	8,432,500.00	Rp	
							Keluaran	: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	Paket	
							Hasil	: Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	99.88	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Dana Alokasi Umum	KABUPATEN NGANJUK	125,977,600.00	124,889,204.00	1,088,396.00	Masukan	: Dana yang dibutuhkan	125,977,600.00	124,889,204.00	Rp	
							Keluaran	: Tersedianya Paket Bahan	12	12	Paket	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							n Logistik Kantor yang Disediaka				
		(D A U)					Hasil : Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	99.14	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Nganjuk	53,596,850.00	53,580,600.00	16,250.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	53,596,850.00	53,580,600.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	12	12	Paket	
							Hasil : Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	99.97	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	2,400,000.00	2,280,000.00	120,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	2,400,000.00	2,280,000.00	Rp	
							Keluaran : Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	95	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Dana Alokasi	KABUPATEN	59,387,700.00	55,752,031.00	3,635,669.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	59,387,700.00	55,752,031.00	Rp	
		Umum (D A U)	NGANJUK				Keluaran : Terlaksananya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	
							Hasil : Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	93.88	%	
1.06 . 01 . 2.06 . 0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	43,634,750.00	43,614,400.00	20,350.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	43,634,750.00	43,614,400.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	
							Hasil : Terwujudnya Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	100	99.95	%	
1.06 . 01 . 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**264,955,800**	**241,338,604**	**23,617,196.00**		**264,955,800**	**241,338,604.00**	**Rp**	
1.06.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	113,694,850	95,820,504.00	17,874,346.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	113,694,850.00	95,820,504.00		
							Keluaran : Terlaksananya Paket Mebel yang Disediakan	36	36	Unit	
							Hasil : Terwujudnya Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	100	84.28	%	
1.06.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Dana Alokasi Umum	KABUPATEN NGANJUK	151,260,950	145,518,100.00	5,742,850.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	151,260,950	145,518,100.00	Rp	
							Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan	46	46	Unit	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN					KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN			RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
		(D A U)					n		Mesin Lainnya yang Disediakan				
							Hasil	:	Terwujudnya Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	100	96	%	
1.06 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**428,200,000.00**	**414,248,067.00**	**13,951,933.00**				**428,200,000.00**	**414,248,067.00**	**Rp**	
1.06 . 01 . 2.08 . 0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1,720,000.00	1,720,000.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Laporan	
							Hasil	:	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	100	%	
1.06 . 01 . 2.08 . 0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	116,100,000.00	102,656,003.00	13,443,997.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	116,100,000.00	102,656,003.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	Laporan	
							Hasil	:	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	88	%	
1.06 . 01 . 2.08 . 0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	310,380,000.00	309,872,064.00	507,936.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	310,380,000.00	309,872,064.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	
							Hasil	:	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	100	%	
1.06 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**507,305,700.00**	**506,824,589.00**	**481,111.00**				**507,305,700.00**	**506,824,589.00**		
1.06 . 01 . 2.09 . 0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	236,949,800.00	236,661,831.00	287,969.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	236,949,800.00	236,661,831.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	31	Unit	
							Hasil	:	Terwujudnya Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	100	99.88	%	
1.06.01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	1,455,000.00	1,454,000.00	1,000.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1,455,000.00	1,454,000.00		
							Keluaran	:	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	3	Unit	
							Hasil	:	Terwujudnya Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	100	99.93		
1.06 . 01 . 2.09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	13,750,000.00	13,736,000.00	14,000.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	13,750,000.00	13,736,000.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	Unit	
							Hasil	:	Terwujudnya Barang Milik	100	99.90	%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN					KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN			RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
							Daerah SKPD yang Terawat						
1.06 . 01 . 2.09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	255,150,900.00	254,972,758.00	178,142.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	255,150,900.00	254,972,758.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	Unit	
							Hasil	:	Terwujudnya Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	100	99.93	%	
1.06 . 02	***Program Pemberdayaan Sosial***			**366,882,750.00**	**360,609,750.00**	**6,273,000.00**				**366,882,750.00**	**360,609,750.00**		
1.06.02.2.02.01	**Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**			**13,961,700.00**	**12,409,200.00**	**1,552,500.00**				**13,961,700.00**	**12,409,200.00**		
1.06.02.2.02.0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*			13,961,700.00	12,409,200.00	1,552,500.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	13,961,700.00	12,409,200.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4	4	Dokumen	
							Hasil	:	Terwujudnya Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85	88.88	%	
1.06 . 02 . 2.03	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***			**352,921,050.00**	**348,200,550.00**	**4,720,500.00**				**352,921,050.00**	**348,200,550.00**		
1.06 . 02 . 2.03 . 0001	*Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	16,234,100.00	14,927,100.00	1,307,000.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	16,234,100.00	14,927,100.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	80	Orang	
							Hasil	:	Terwujudnya Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85	91.95	%	
1.06 . 02 . 2.03 . 0002	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	250,274,900.00	249,839,900.00	435,000.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	250,274,900.00	249,839,900.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	Orang	
							Hasil	:	Terwujudnya Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85	99.83	%	
1.06 . 02 . 2.03 . 0004	*Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber*	Dana Alokasi	DINAS SOSIAL	86,412,050.00	83,433,550.00	2,978,500.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	86,412,050.00	83,433,550.00	Rp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Umum (D A U)	PPPA								
							Keluaran : Terlaksananya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80	72	Lembaga	
							Hasil : Terwujudnya Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85	96.55	%	
1.06 . 04	***Program Rehabilitasi Sosial***			**2,427,208,200.00**	**2,375,312,174.00**	**51,896,026.00**		**2,427,208,200.00**	**2,375,312,174.00**	**Rp**	
1.06 . 04 . 2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***			**1,058,064,800.00**	**1,048,423,588.00**	**9,641,212.00**		**1,058,064,800.00**	**1,048,423,588.00**		
1.06.04.2.01.0005	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*			37,216,800.00	36,224,800.00	992,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	37,216,800.00	36,224,800.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	66	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85	97.33	%	
1.06 . 04 . 2.01 . 0006	*Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat*	Dana Alokasi Umum (D A U)	DINAS SOSIAL PPPA	536,500,000.00	528,745,000.00	7,755,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	536,500,000.00	528,745,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	420	351	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85	98.55	%	
1.06 . 04 . 2.02 . 0010	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	484,348,000.00	483,453,788.00	894,212.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	484,348,000.00	483,453,788.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	325	48	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan	85	99.82	%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Sosial di Luar Panti				
1.06 . 04 . 2.02	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***			**1,369,143,400.00**	**1,326,888,586.00**	**42,254,814.00**		**1,369,143,400.00**	**1,326,888,586.00**		
1.06.04.2.02.0003	*Penyediaan Permakanan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	414,540,450.00	374,782,270.00	39,758,180.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	414,540,450.00	374,782,270.00		
							Keluaran : Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1,330	730	Orang	
							Hasil : Terwujudnya PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85	90.41	%	
1.06 . 04 . 2.02 . 0007	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	167,502,950.00	166,485,316.00	1,017,634.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	167,502,950.00	166,485,316.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	98	103	Orang	
							Hasil : Terwujudnya PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85	99.39	%	
1.06 . 04 . 2.02 . 0012	*Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	5,000,000.00	3,700,000.00	1,300,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	5,000,000.00	3,700,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desemb	24	18	orang	
							Hasil : Terwujudnya PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85	74.00	%	
1.06.04.2.02.0014	*Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	782,100,000	781,921,000	179,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	782,100,000	781,921,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	22	22	Lembaga	
							Hasil : Terwujudnya PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85	99.98	%	
1.06 . 05	***Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial***			**12,089,917,200.00**	**11,151,015,149.00**	**938,902,051.00**		**12,089,917,200.00**	**11,151,015,149.00**		
1.06 . 05 . 2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***			**12,089,917,200.00**	**11,151,015,149.00**	**938,902,051.00**		**12,089,917,200.00**	**11,151,015,149.00**		
1.06 . 05 .	*Pengelolaan Data Fakir*	Dana	KABUPATE	209,562,300.00	149,191,363.00	60,370,937.00	Masuka : Dana yang dibutuhkan	209,562,300.00	149,191,363.00	Rp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN					KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN			RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
2.02.0002	*Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	Alokasi Umum (D A U)	N NGANJUK				n						
							Keluaran	:	Terlaksananya Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	214,620	214,620	Keluarga	
							Hasil	:	Terwujudnya Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85	71.19	%	
1.06.05.2.02.0003	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	11,880,354,900	11,001,823,786.00	878,531,114.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	11,880,354,900	11,001,823,786.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8,123	7,891	Keluarga	
							Hasil	:	Terwujudnya Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85	92.61	%	
1.06 . 06	***Program Penanganan Bencana***			**340,937,450.00**	**320,808,500.00**	**20,128,950.00**				**340,937,450.00**	**320,808,500.00**		
1.06 . 06 . 2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***			**71,553,650.00**	**70,740,500.00**	**813,150.00**				**71,553,650.00**	**70,740,500.00**		
1.06 . 06 . 2.01 . 0001	*Penyediaan Makanan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	71,553,650.00	70,740,500.00	813,150.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	71,553,650.00	70,740,500.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	550	375	Orang	
							Hasil	:	Terwujudnya Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85	98.86	%	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			**269,383,800.00**	**250,068,000.00**	**19,315,800.00**				**269,383,800.00**	**250,068,000.00**		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			269,383,800.00	250,068,000.00	19,315,800.00	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	269,383,800.00	250,068,000.00	Rp	
							Keluaran	:	Terlaksananya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68	72	Orang	
							Hasil	:	Terwujudnya ampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	85	92.83	%	
1.06 . 07	***Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan***			**70,037,750.00**	**67,439,900.00**	**2,597,850.00**				**70,037,750.00**	**67,439,900.00**		
1.06 . 07 . 2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional***			**70,037,750.00**	**67,439,900.00**	**2,597,850.00**				**70,037,750.00**	**67,439,900.00**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1.06 . 07 . 2.01 . 0002	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	70,037,750.00	67,439,900.00	2,597,850.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	70,037,750.00	67,439,900.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	560	560	Makam	
							Hasil : Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan TMP	85	96.29	%	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1,273,496,900.00**	**1,204,961,417.00**	**68,535,483.00**		**1,273,496,900.00**	**1,204,961,417.00**		
2.08	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**1,273,496,900.00**	**1,204,961,417.00**	**68,535,483.00**		**1,273,496,900.00**	**1,204,961,417.00**		
2.08 . 02.2.01	***Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan***			**340,860,000.00**	**308,574,000.00**	**32,286,000.00**		**340,860,000.00**	**308,574,000.00**		
2.08 . 02 . 2.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***			**63,500,000.00**	**53,910,000.00**	**9,590,000.00**		**63,500,000.00**	**53,910,000.00**		
2.08 . 02 . 2.01 . 0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	7,200,000	3,732,000.00	3,468,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	7,200,000	3,732,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	51.83	%	
2.08 . 02 . 2.01 . 0002	*Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	15,650,000	15,233,000.00	417,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	15,650,000	15,233,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	97.34	%	
2.08 . 02 . 2.01 . 0003	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	34,650,000.00	29,162,000.00	5,488,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	34,650,000.00	29,162,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	42	42	Perangkat Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Hasil : Terwujudnya PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	84.16	%	
2.08 . 02 . 2.01 . 0004	*Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	6,000,000	5,783,000.00	217,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	6,000,000	5,783,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	42	OPD	
							Hasil : Terwujudnya PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100	96.38	%	
2.08 . 02 . 2.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***			**18,200,000.00**	**18,078,000.00**	**122,000.00**		**10,000,000.00**	**9,918,000.00**		
2.08.02.2.02.0001	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	8,200,000.00	8,160,000.00	40,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	8,200,000.00	8,160,000.00		
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot	4	4	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan BIdang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	99.51		
2.08 . 02 . 2.02 .0002	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	10,000,000.00	9,918,000.00	82,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	10,000,000.00	9,918,000.00	Rp	
							Keluaran : Terwujudnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	65	65	Organisasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Hasil : Terwujudnya Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan BIdang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	99.18	%	
2.08.02.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***			**259,160,000**	**236,586,000**	**22,574,000**		**259,160,000**	**236,586,000.00**	Rp	
2.08.02.2.03.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	9,500,000	9,433,000.00	67,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	9,500,000	9,433,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65	65	Lembaga	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	99.29	%	
2.08.02.2.03.02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	241,660,000	219,153,000.00	22,507,000.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	241,660,000	219,153,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2300	2,675	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	90.69	%	
2.08.02.2.03.0003	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	8,000,000	8,000,000.00	0.00	Masukan :	8,000,000	8,000,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen	1	1	Dokumen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							n Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	100.00		
2.08 . 03	***Program Perlindungan Perempuan***			**222,826,800.00**	**209,186,000.00**	**13,640,800.00**		**222,826,800.00**	**209,186,000.00**		
2.08.03.2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***			**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**		**150,000,000.00**	**150,000,000.00**		
2.08.03.2.02.0001	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*			150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	150,000,000.00	150,000,000.00		
							Keluaran : Terlaksananya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370	92	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	100.00		
2.08 . 03 . 2.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**72,826,800.00**	**59,186,000.00**	**13,640,800.00**		**72,826,800.00**	**59,186,000.00**		
2.08.03.2.03.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*			72,826,800.00	59,186,000.00	13,640,800.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	72,826,800.00	59,186,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	8	8	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Layanan Rujukan yang Ditangani	100	81.27	%	
2.08 . 04	***Program Peningkatan Kualitas Keluarga***			**145,971,050.00**	**144,329,238.00**	**1,641,812.00**		**145,971,050.00**	**144,329,238.00**		
2.08 . 04 . 2.01	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**55,899,700.00**	**55,246,094.00**	**653,606.00**		**55,899,700.00**	**55,246,094.00**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.04.2.01.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	9,857,500.00	9,592,000.00	265,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	9,857,500.00	9,592,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50	52	Perangkat Daerah	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	97.31	%	
2.08.04.2.01.0002	*Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	36,041,700.00	35,966,094.00	75,606.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	36,041,700.00	35,966,094.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	99.79	%	
2.08 . 04 . 2.01 . 0003	*Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	10,000,500.00	9,688,000.00	312,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	10,000,500.00	9,688,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	Laporan	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	96.88	%	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**29,931,500**	**29,144,000.00**	**787,500.00**		**29,931,500**	**29,144,000.00**	**Rp**	
2.08.04.2.02.00	*Advokasi Kebijakan dan*	Dana	KABUPATE				Masuka : Dana yang dibutuhkan	9,98	9,674,000.00	Rp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	*Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Alokasi Umum (D A U)	N NGANJUK	9,986,500	9,674,000.00	312,500.00	n	6,500			
							Keluaran : Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50	0	Lembaga	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100	96.87	%	
2.08.04.2.02.00 02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	9,972,500	9,510,000.00	462,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	9,972,500	9,510,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	95.36	%	
2.08.04.2.02.00 03	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	9,972,500	9,960,000.00	12,500.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	9,972,500	9,960,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	99.87	%	
2.08 . 04 . 2.03	***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***			**60,139,850.00**	**59,939,144.00**	**200,706.00**		**60,139,850.00**	**59,939,144.00**		
2.08 . 04 . 2.03 . 0001	*Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	60,139,850.00	59,939,144.00	200,706.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	60,139,850.00	59,939,144.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	100	98	Layanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN					KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN		RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
								dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				
							Hasil :	Terwujudnya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	99.67	%	
2.08 . 05	***PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK***			**18,530,000.00**	**17,684,394.00**	**845,606.00**			**18,530,000.00**	**17,684,394.00**		
2.08 . 06 . 2.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**18,530,000.00**	**17,684,394.00**	**845,606.00**			**18,530,000.00**	**17,684,394.00**		
2.08 . 06 . 2.01 . 0001	*Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	11,000,000.00	10,943,394.00	56,606.00	Masukan :	Dana yang dibutuhkan	11,000,000.00	10,943,394.00	Rp	
							Keluaran :	Terlaksananya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	20	Orang	
							Hasil :	Terwujudnya Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	99.49	%	
2.08.05.2.01.0002	*Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	7,530,000	6,741,000.00	789,000.00	Masukan :	Dana yang dibutuhkan	7,530,000	6,741,000	Rp	
							Keluaran :	Terlaksananya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	Dokumen	
							Hasil :	Terwujudnya Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	89.52	%	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**372,324,650.00**	**356,207,194.00**	**16,117,456.00**			**372,324,650.00**	**356,207,194.00**		
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**372,324,650.00**	**356,207,194.00**	**6,449,656.00**			**372,324,650.00**	**356,207,194.00**		
2.08.06.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan			110,729,800.00	101,062,000.00	9,667,800.00	Masukan :	Dana yang dibutuhkan	110,729,800.00	101,062,000.00	**Rp**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
							Keluaran : Terlaksananya Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	2	Organisasi	
							Hasil : Terwujudnya Kegiatan Kelembagaan PHA	100	91.27	%	
2.08.06.2.01.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	261,594,850	255,145,194.00	6,449,656.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	261,594,850	255,145,194.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	Organisasi	
							Hasil : Terwujudnya Kegiatan Kelembagaan PHA	100	97.53	%	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**172,984,400**	**168,980,591**	**4,360,009**		**172,984,400**	**168,980,591.00**	**Rp**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**6,715,700**	**6,166,000**	**549,700**		**6,715,700**	**6,166,000.00**	**Rp**	
2.08.07.2.01.01	*Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	6,715,700	6,166,000.00	549,700.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	6,715,700	6,166,000.00	Rp	
							Keluaran : Terlaksananya AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30	30	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	100	91.81	%	
2.08.07.2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**73,467,500.00**	**70,369,591.00**	**3,810,309.00**		**73,467,500.00**	**70,369,591.00**		
2.08.07.2.02.0001	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	68,731,400.00	66,569,591.00	2,161,809.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	68,731,400.00	66,569,591.00		
							Keluaran : Terlaksananya AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30	59	Orang	
							Hasil : Terwujudnya Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	100	96.85	%	
2.08.07.2.02.0002	*Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	4,736,100.00	3,800,000.00	936,100.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	4,736,100.00	3,800,000.00		
							Keluaran : Terlaksananya AMPK yang mendapatkan layanan	100	3	Layanan	
							Hasil : Terwujudnya Anak Korban	100	80.23	%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	BELANJA			HASIL / KEGIATAN				KET
				ANGGARAN	REALISASI	SISA	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi			**92,801,200.00**	**92,445,000.00**	**356,200.00**		**92,801,200.00**	**92,445,000.00**		
2.08.07.2.02.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dana Alokasi Umum (D A U)	KABUPATEN NGANJUK	92,801,200.00	92,445,000.00	356,200.00	Masukan : Dana yang dibutuhkan	92,801,200.00	92,445,000.00		
							Keluaran : Terlaksananya kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	10	11	Dokumen	
							Hasil : Terwujudnya Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	99.62	%	
TOTAL				**21,746,324,150.00**	**20,440,814,459.00**	**1,305,509,691.00**		**21,746,324,150.00**	**20,440,814,459.00**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Telp. (0358)3550772 Fax. (0358)3550772 Nganjuk 64412

Nganjuk, 20 Februari 2025

Yth. Asisten Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Di
N G A N J U K

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.8.6.3 / 221 /411.304/ 2025

No	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 (Satu) Bundel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

Tembusan Yth:
Kepala Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	1.06.02.2.02.0001
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Peserta	:	48 Orang
Pelaksanaan	:	Kamis, 20 Juni 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi terkait peraturan dan tata cara penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi terkait peraturan dan tata cara penerbitan izin Pengumpulan Uang atau Barang 3. Pemahaman tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah 4. Pemahaman tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.02.2.03.0001
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Peserta : 80 orang PSM
Pelaksanaan : Selasa, 16 Juli 2024
Hasil :

1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Nganjuk
2. Koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas Pekerja Sosial Masyarakat
3. Mensinergikan antara PSM dan Dinas Sosial PPPA dalam rangka memberikan pelayanan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan social
4. Pekerja Sosial Masyarakat lebih termotivasi dalam membantu penanganan PPKS

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.02.2.03.0002

Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Peserta : 20 orang TKSK

Pelaksanaan : Senin, 2 September 2024

Hasil :

1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk
2. Koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
3. Mensinergikan antara TKSK dan Dinas Sosial PPPA dalam rangka memberikan pelayanan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
4. TKSK lebih termotivasi dalam penanganan PPKS

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.02.2.03.0004

Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna Kabupaten)

Peserta : 60 orang

Pelaksanaan : Selasa, 11 juni 2024

Hasil :
1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk
2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat pengurus Karang Taruna
3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, dan sebagai ajang silaturahmi bagi Karang Taruna.
4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan bekerja dalam tim bagi Karang Taruna.

Kegiatan : Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Ngluyu

Peserta : 30 orang

Pelaksanaan : Kamis, 13 Juni 2024

Hasil :
1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan
2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna
3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna.
4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna.

5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

Kegiatan : Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Lengkong
Peserta : 30 orang
Pelaksanaan : Selasa, 25 Juni 2024
Hasil :
1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan
2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna
3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna.
4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna.
5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah.

Kegiatan : Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Jatikalen
Peserta : 30 orang
Pelaksanaan : Kamis, 27 Juni 2024
Hasil :
1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan
2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna
3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna.
4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna.
5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Ngronggot
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Selasa, 10 September 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Nganjuk
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Senin, 23 September 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Baron
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Senin, 30 September
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Bagor
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Rabu, 16 Oktober 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Wilangan
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Kamis 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Rejoso
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Senin, 21 Oktober 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Loceret
Peserta	:	30 orang
Pelaksanaan	:	Senin, 28 Oktober 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya pembinaan dan motivasi kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan 2. Mendorong pengembangan diri, peningkatan keterampilan dan pengembangan minat/bakat para Karang Taruna 3. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi bagi Karang Taruna. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja dalam tim bagi Karang Taruna. 5. Memberikan wawasan terkait upaya mengenali permasalahan sosial dan mengembangkan potensi daerah

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.07.2.01.0002

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/KotA

Kegiatan :

Peserta :

Pelaksanaan :

Hasil :

N I H I L

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

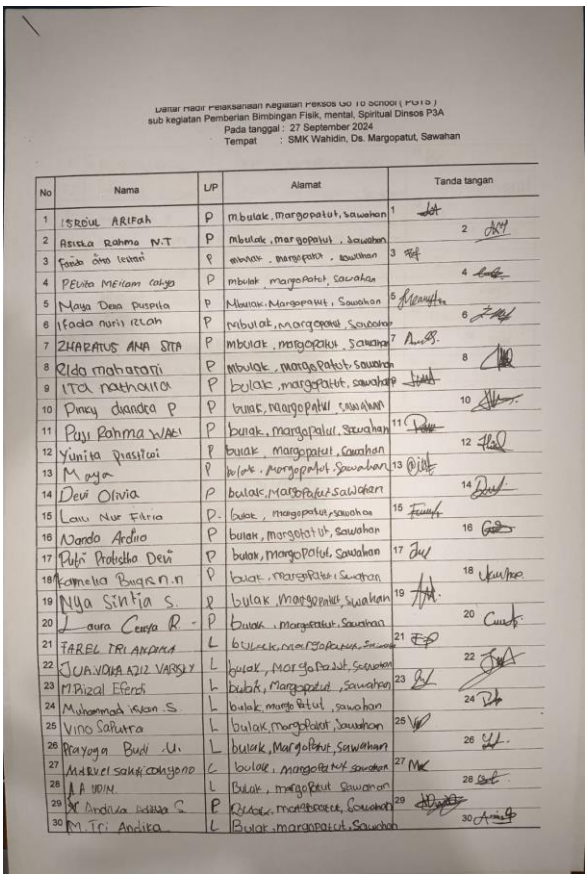
Kode Rekening	:	1.06.04.2.01.0005
Sub Kegiatan	:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Kegiatan	:	Peksos Goes To School (PGTS)
Peserta	:	40 Orang Dengan Data Terlampir
Pelaksanaan	:	Jumat, 27 September 2024
Hasil	:	1. Memberikan bimbingan dan motivasi bagi siswa siswi di sekolah, membangun kesadaran, pemahaman, dan tanggungjawab untuk melindungu anak anak, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan 2. Semua peserta hadir sejumlah 40 siswa 3. Kegiatan sosialisasi berjalan sesuai dengan target sasaran

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

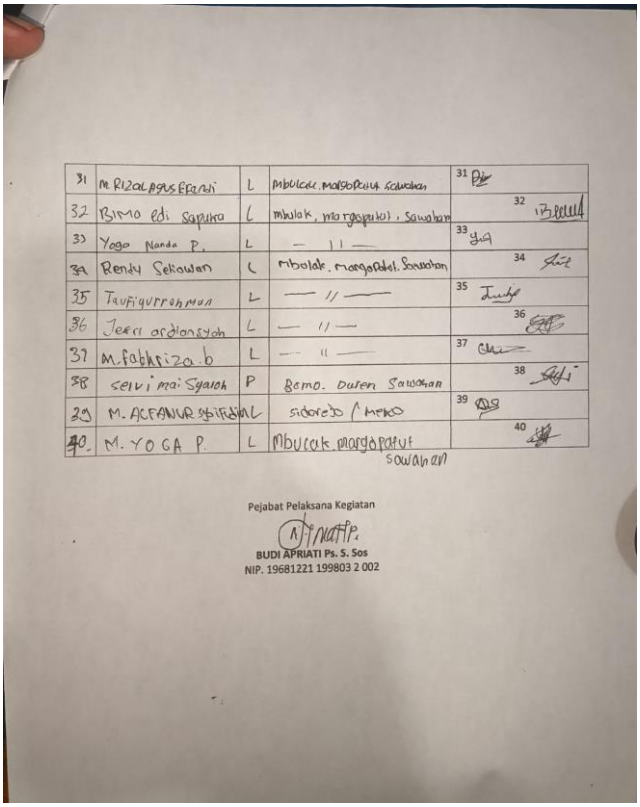
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Lampiran



Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan Peksos Go To School (PGTS)
sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual Dinsos P3A
Pada tanggal : 27 September 2024
Tempat : SMK Wahidin, Ds. Margopatut, Sawahan

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda tangan
1	ISROUL ARIFah	P	mbulak, Margopatut, Sawahan	1
2	Aisela Rahma N.T	P	mbulak, margopatut, sawahan	2
3	Fanda ayu lestari	P	mbulak, margopatut, sawahan	3
4	PEVita Meilan cahya	P	mbulak margopatut, sawahan	4
5	Maya Dewa Puspita	P	Mbulak. Margopatut, Sawahan	5
6	Ifada nuril izzah	P	mbulak, margopatut, Sawahan	6
7	ZHARATUS ANA SITA	P	mbulak, margopatut, Sawahan	7
8	Rida maharani	P	mbulak, margopatut, Sawahan	8
9	ITA nathania	P	bulak, margopatut, sawahan	
10	Pinky chandra P	P	bulak, margopatut, sawahan	10
11	Puji Rahma WATI	P	bulak, margopatut, Sawahan	11
12	Yunita prasitoi	P	bulak, Margopatut, Sawahan	12
13	M aya	P	bulak, margopatut, Sawahan	13
14	Devi Olivia	P	bulak, Margopatut, Sawahan	14
15	Lavi Nur Faria	P	bulak, margopatut, sawahan	15
16	Nando Ardio	P	bulak, margopatut, Sawahan	16
17	Putri Protistha Devi	P	bulak, Margopatut, Sawahan	17
18	Kamelia Bugan.n	P	bulak, margopatut, Sawahan	18
19	Nya Sintia S.	P	bulak, margopatut, Sawahan	19
20	Laura Cenya R.	P	bulak, margopatut, Sawahan	20
21	FAREL PRIANDIKA	L	bulak, margopatut, Sawahan	21
22	JUAVORA AZIZ VARSLY	L	bulak, Margopatut, Sawahan	22
23	M Rizal Efendi	L	bulak, Margopatut, Sawahan	23
24	Muhammad Ikhsan S	L	bulak margopatut, sawahan	24
25	Vino Saputra	L	bulak Margopatut, Sawahan	25
26	Prayoga Budi .U.	L	bulak, Margopatut, Sawahan	26
27	MARVEL SAKA cahyono	L	bulak, margopatut sawahan	27
28	A A WDN	L	Bulak, margopatut Sawahan	28
29	Andika [illegible]	P	Bulak, margopatut, Sawahan	29
30	M. Tri Andika	L	Bulak. margopatut. Sawahan	30



31	M. RIZAL AGUS EFENDI	L	Mbulak. Margopatut sawahan	31
32	BIMO EDI SAPUTRA	L	mbulak, margopatut, Sawahan	32
33	Yogo Nanda P.	L	— 11 —	33
34	Rendy Setiawan	L	mbulak. margopatut. Sawahan	34
35	Taufiqurrohman	L	— 11 —	35
36	Jeki ardiansyah	L	— 11 —	36
37	M. fabhriza. b	L	— 11 —	37
38	selvi mai Syaroh	P	Bomo. Duren Sawahan	38
39	M. ACFANUR SYIFRIAL	L	sidorejo / mako	39
40	M. YOGA P	L	Mbulak margopatut sawahan	40

Pejabat Pelaksana Kegiatan

BUDI APRIATI Ps. S. Sos
NIP. 19681221 199803 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.04.2.01.0006

Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Kegiatan : Penyaluran Bantuan Sosial Disabilitas di Kabupaten Nganjuk

Peserta : 351 Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan : Selasa s/d Kamis, Tanggal 17 s/d 19 September 2024

Hasil :

1. Dilaksanakan di 20 Kecamatan
2. Jumlah penerima bansos disabilitas yang tersalur 268 dan tidak tersalurkan 12 KPM dikarenakan meninggal dan double data
3. kriteria bagi penerima bansos disabilitas : penyandang disabilitas, terdaftar di DTKS Dan berdomisili di kabupaten nganjuk
4. Memberikan harapan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar kehidupan yang layak
5. Memberikan dorongan serta motivasi bagi penyandang disabilitas
6. Meringankan beban penyandang disabilitas

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.04.2.01.0010
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan

Kegiatan : Pemberian Bimbingan serta Pelayanan bagi pemerlu PPKS
Peserta : 325 Orang
Pelaksanaan : Senin s/d Selasa Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024
Hasil :
1. Pemberian Hibah langsung transfer di rekening PMI
2. Pengadaan 4 Buah Kursi roda untuk PPKS
3. Desa Mengajukan surat permohonan bantuan kursi roda untuk PPKS ke Dinas Sosial, PPPA
4. Memberikan Bimbingan serta Dorongan Motivasi bagi PPKS
5. Memberikan Pelayanan Sosial bagi PPKS
6. Meningkatkan Kualitas Hidup bagi PPKS

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.04.2.02.0003
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Kegiatan : Pemberian Sembako Bagi PPKS
Peserta : 2364 PPKS
Pelaksanaan : Senin s/d Selasa Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024
Hasil :
1. Tersalurnya Bantuan bahan makan Bagi PPKS sejumlah 2364
2. Mekanisme pemberian bantuan Desa Mengajukan surat permohonan bantuan sembako kepada Dinas Sosial PPPA
3. Membantu mengurangi beban pengeluaran PPKS
4. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada PPKS

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	1.06.04.2.02.0007
Sub Kegiatan	:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Kegiatan	:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Serta Permakanan bagi anak – anak ABH dan PPKS
Peserta	:	95 Orang
Pelaksanaan	:	Senin s/d Selasa Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024
Hasil	:	1. Memberikan Bimbingan serta Dorongan Motivasi bagi ABH 2. Memberikan Pelayanan Sosial bagi ABH 3. Meningkatkan Kualitas Jasmani dan Rohani bagi ABH 4. Memberikan permakanan bagi anak-anak abh dan ppks 5. Sesuai target yang ditentukan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.04.2.02.0012
Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Kegiatan : Pemberian Bantuan untuk Orang Terlantar
Peserta : 24 Orang
Pelaksanaan : Senin s/d Selasa Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024
Hasil :
1. Memberikan Bimbingan Sosial bagi OT
2. Memberikan Pelayanan Sosial bagi OT
3. Memberikan Bantuan Transport bagi OT

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.04.2.02.0014

Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyaluran Bantuan Sosial bagi LKSA di Kabupaten Nganjuk

Peserta : 22 LKSA

Pelaksanaan : Jumat s/d Selasa, Tanggal 16 s/d 20 Agustus 2024

Hasil :

1. 22 lksa, di 13 kecamatan, Kertosono, patianrowo, nganjuk, sawahan, rejoso, prambon, pace, tanjunganom, ngronggot, berbek, bagor, baron, jatikalen
2. Penyalurannya di rekening masing masing lksa
3. Memberikan bantuan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai dengan standar kehidupan yang layak
4. Memberikan dorongan serta motivasi bagi LKSA
5. Meringankan beban LKSA dalam pemenuhan dasar di lembaga

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.05.2.02.0002
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Bimbingan Teknis bagi Operator SIKS-NG
Peserta : 304 Peserta
Pelaksanaan : Kamis s/d Jumat Tanggal 05 s/d 06 Desember 2024
Hasil :
1. Pelaksanaan bimtek dihadiri 304 Peserta
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan data kesejahteraan sosial
3. Memudahkan pengelolaan data kesejahteraan sosial
4. Memudahkan proses pendaftaran bantuan sosial (bansos)
5. Meningkatkan akurasi data
6. Meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.05.2.02.0003

Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan : Penyaluran Bansos Lansia Miskin Dan Siswa Miskin di Kabupaten Nganjuk

Peserta : 4049 Lansia dan 385 Siswa Miskin

Pelaksanaan : Bansos Lansia Rabu s/d Senin, 04 September s/d 09 September 2024

Hasil :

1. Bansos lansia tersalur 4032 tidak tersalurkan 36 KPM Karena Meninggal dan Doubel Data
2. Bansos siswa miskin tersalur 352 Siswa, tidak tersalurkan 2 Siswa dikarenakan sudah Keluar
3. Memberikan bantuan sosial bagi lanjut usia miskin sesuai dengan standar kehidupan yang layak
4. Memberikan dorongan motivasi bagi lanjut usia miskin
5. Memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin
6. Meringankan beban lanjut usia miskin
7. Mencegah angka putus sekolah
8. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan pribadi dalam kegiatan pembelajaran
9. Membiasi siswa untuk belajar lebih giat dan lebih baik
10. Meringankan beban orangtua yang tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.06.2.01.0001
Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan

Kegiatan : Pemberian Bahan Permakanan Bagi Korban Bencana Cakupan Kabupaten/Kota
Peserta : 214 Paket
Pelaksanaan : Senin s/d Selasa Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024
Hasil :
1. Tersalurnya Bantuan bahan permakanan Bagi Korban Bencana Cakupan Kabupaten/Kota sejumlah 214 paket
2. Penyaluran bahan permakanan dilakukan setiap ada laporan terkait kejadian bencana
3. Memenuhi kebutuhan permakanan dan membantu mengurangi beban Korban Bencana Cakupan Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 1.06.06.2.02.0002

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Kegiatan :
1. Kampung Siaga Bencana
2. Tagana Masuk Sekolah

Peserta :
1. 50 Peserta x 4 sekolah
2. 50 Peserta x 1 kegiatan

Pelaksanaan :
1. 29 Juli 2024 (Kampung Siaga Bencana)
2. 26,30,31 Juli dan 01 Agustus 2024 (Tagana Masuk Sekolah)

Hasil :
1. Masyarakat menjadi paham akan kesiapsiaagan terhadap bencana
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar
3. untuk mengedukasi siswa agar memiliki kemampuan menghadapi bencana
4. Kegiatan sosialisasi berjalan sesuai dengan target sasaran

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.02.2.01.0001
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PUG Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	15 Orang
Pelaksanaan	:	Selasa, 5 November 2024
Hasil	:	1. Rapat Koordinasi Tim Penggerak PUG diharpkan semua tim untuk aktif dalam evaluasi PUG Tahun 2024 2. Evaluasi PUG yang sekiranya dilaksanakan tahun depan namun untuk tahun 2023 dilakukan tahun 2024 yang dilakukan secara mandiri 3. Mohon untuk OPD hadapan masing-masing tim penggerak untuk dibantu mempercepat laporan PUG 4. Setiap hari akan dilakukan evaluasi PUG untuk pengisian LKE mandiri

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PUG Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	15 Orang
Pelaksanaan	:	Kamis, 14 November 2024
Hasil	:	1. Pada Evaluasi PUG point Kabupaten Nganjuk 940 2. Masih ada bagian-bagian yang belum dijawab terutama pada bagian pelembagaan dan perencanaan 3. Diharapkan tahun ini penilaian PUG bisa naik dan peingkat APE bisa naik

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.01.0002

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Sosialisasi Revitalisasi PUG di Kabupaten Nganjuk

Peserta : 65 Orang

Pelaksanaan : Rabu dan Kamis, 26 dan 27 Juni 2024

Hasil :
1. Revitalisasi PUG di Kabupaten Nganjuk mulai dilaksanakan Tahun 2024
2. Dalam Pengarusutamaan Gender akan ditambah menjadi Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI)

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.01.0003
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengisian Evaluasi PUG Tahun 2024
Peserta : 45 Orang
Pelaksanaan : Kamis, 17 Oktober 2024
Hasil :
1. Tahun 2024 dilakukan evaluasi PUG namun untuk pemberian penghargaan dilakukan tahun 2025
2. Mulai tanggal 17 Oktober 2024 sudah bisa mulai mengisi aplikasi
3. Kabupaten bisa melakukan koordinasi dengan Provinsi apabila mengalami kesulitan dalam pengisian aplikasi

Kegiatan : Pelaksanaan Pelembagaan PUG dan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak
Peserta : 52 Orang
Pelaksanaan : Selasa, 26 November 2024
Hasil :
1. Narasumber dari DP3AK Provinsi Jawa Timur mengenalkan aplikasi tentang data pilah tiap OPD
2. OPD bisa mulai mengisi aplikasi yang telah di sosialisasikan dan hasilnya bisa untuk mengetahui data pilah tiap OPD di Kabupaten Nganjuk

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.01.0004
Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

Kegiatan : Musyawarah Tematik Khusus Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Super Keren)
Peserta : 62 Orang
Pelaksanaan : Selasa, 2 April 2024
Hasil :
1. Dari musyawarah tematik dihasilkan beberapa usulan kegiatan antara lain pelatihan untuk disabilitas, pemberian bantuan kepada kelompok rentan dan Sosialisasi dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
2. Hasil musyawarah dikirimkan ke BAPPEDA untuk ditindak lanjuti

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.02.0001

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Peserta : 40 Orang

Pelaksanaan : Senin, 9 September 2024

Hasil :

1. Diharapkan Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender dan wadah untuk mengembangkan potensi sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut serta dalam Pembangunan
2. Kaum perempuan harus terlibat dalam segala bentuk dan proses pembangunan di segala bidang
3. Pentingnya partisipasi perempuan untuk terwujudnya pembangunan yang berkesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, terwujudnya stabilitas sosial dimasyarakat dan pembangunan lebih inklusif dan adil

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.02.0002

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi pada Bidang Politik

Peserta : 80 Orang

Pelaksanaan : Selasa, 8 Oktober 2024

Hasil :

1. Hasil Pemilu 2024 Legislatif ada 11 orang anggota DPRD perempuan dari 50 orang jumlah anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk
2. Kaum perempuan harus terlibat dalam segala bentuk dan proses pembangunan di bidang politik
3. Pelaksanaan pemilu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, untuk gubernur ada 3 calon dan bupati ada 3 calon
4. Diharapkan ibu-ibu semua untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.03.0001

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Peserta : 60 Orang

Pelaksanaan : Selasa, 10 September 2024

Hasil :

1. Diharapkan semua sektor Perangkat Daerah, Akademisi dan Lembaga Masyarakat memahami tentang Pengarusutamaan Gender
2. Akan dibentuk revitalisasi forum puspa baru karena forum puspa dulu tidak bisa berjalan
3. Semua sektor Perangkat Daerah, Akademisi dan Lembaga Masyarakat harus berperan aktif dlam pencegahan kekerasn perempuan dan anak
4. Mendukung pembangunan PPPA yang dikembangkan di Kabupaten dan Desa di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.03.0002

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Workshop Peringatan Hari Kartini

Peserta : 300 Orang

Pelaksanaan : Rabu, 24 April 2024

Hasil :
1. Keluarga bisa mengimplementasi Pengasuhan anak di era digital dengan membatasi waktu penggunaan gadget dan mengawasi penggunaan gadget
2. Diskusikan risiko dan dampak penggunaan gadget
3. Ajarkan anak untuk menggunakan gadget secara bijaksana
4. Dorong anak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis
5. Ajarkan anak untuk menjaga privasi dan keamanan online
6. Ajak anak untuk melakukan aktivitas positif
7. Buat kesepakatan untuk tidak sibuk dengan gadget saat melakukan aktivitas bersama keluarga

Kegiatan : Rapat Koordinasi Program Kerja Sapa Mama Kabupaten Nganjuk

Peserta : 20 Orang

Pelaksanaan : Senin, 3 Juni 2024

Hasil :
1. Membahas rencana kegiatan sekolah perempuan tahun 2024
2. Membahas SK Fasilitator Sap Mama
3. Fasilitator dimohon tetap melakukan pendampingan Desa binaannya masing-masing

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

Kegiatan	:	Workshop Peringatan Hari Ibu dan HUT DWP Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	300 Orang
Pelaksanaan	:	Selasa, 17 Desember 2024
Hasil	:	1. Materi yang diberikan Narasumber Ibu Risa Rahmawati, S.Psi., M.Psi Psikolog berjudul Interpersonal and Intrapersonal Skill 2. Ibu -ibu yang tergabung dalam Organisasi Wanita di Kabupaten Nganjuk harus bisa menunjukkan kemampuan dalam memahami diri sendiri dan dalam berhubungan dengan orang lain 3. Peserta berperan aktif dalam tanya jawab dengan narasumber

Kegiatan	:	Evaluasi dan Sosialisasi Program Sapa Mama serta DRPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
Peserta	:	60 Orang
Pelaksanaan	:	Senin, 23 Desember 2024
Hasil	:	1. Mengevaluasi kegiatan sekolah perempuan tahun 2024 2. Sapa Mama sudah bagus dan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan 3. Desa sudah mulasi bisa memenuhi 10 indikator DRPPA

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.02.2.03.0003

Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

Peserta :

Pelaksanaan :

Hasil :

N I H I L

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.04.2.01.0001

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Advokasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Alur Perkara Dispensasi Nikah/SOP sesuai dengan Kewenangannya

Peserta : 50 orang terdiri dari Kepala KUA dan Kaur Kesra (Kecamatan Ngetos, Prambon dan Tanjunganom)

Pelaksanaan : Kamis, 1 Agustus 2024

Hasil : Terlaksananya Advokasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan Stunting

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.04.2.01.0002
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Sosialisasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Alur Perkara Dispensasi Nikah/SOP sesuai dengan Kewenangannya
Peserta	:	50 orang terdiri dari Kepala KUA dan Kaur Kesra (Kecamatan Ngetos, Prambon dan Tanjunganom)
Pelaksanaan	:	Rabu, 31 Juli 2024
Hasil	:	Terlaksananya Advokasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan Stunting

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.04.2.01.0003

Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Sosialisasi Pencegahan Kenakalan pada Anak Usia Remaja dan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan Alur Perkara Dispensasi Nikah/SOP sesuai dengan Kewenangan

Peserta : 50 orang terdiri dari Guru Bimbingan Konseling Tingkat SMP Negeri Se-Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan : Jum'at, 25 Oktober 2024

Hasil : Terlaksananya Sosialisasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Anak di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting yang diharapkan di tahun 2024 sudah tercapai angka 14% serta menumbuhkan semangat bagi remaja, anak-anak untuk lebih berprestasi dan meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar terwujud peningkatan kualitas keluarga

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.04.2.02.0001
Sub Kegiatan	:	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Advokasi Peran Aktif Guru BK dalam Pengembangan Aspek Kepribadian Siswa dan Pendampingan Psikologis pada Siswa
Peserta	:	50 orang terdiri dari Guru Bimbingan Konseling Tingkat SMP Negeri Se-Kabupaten Nganjuk
Pelaksanaan	:	Kamis, 24 Oktober 2024
Hasil	:	Terlaksananya Advokasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Anak di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting yang diharapkan di tahun 2024 sudah tercapai angka 14% serta menumbuhkan semangat bagi remaja, anak-anak untuk lebih berprestasi dan meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar terwujud peningkatan kualitas keluarga

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.04.2.02.0002

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan Alur Perkara Dispensasi Nikah/SOP sesuai dengan Kewenangannya

Peserta : 50 orang terdiri dari Kepala KUA dan Kaur Kesra /Modin (Kecamatan Loceret, Ngronggot dan Sawahan)

Pelaksanaan : Kamis, 30 Mei 2024

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan Stunting yang diharapkan di Tahun 2024 sudah harus tercapai angka 14 %

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.04.2.02.0003
Sub Kegiatan	:	Penguatan Jejaring antar Lembega Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan Alur Perkara Dispensasi Nikah/SOP sesuai dengan Kewenangannya
Peserta	:	50 orang terdiri dari Kepala KUA dan Kaur Kesra /Modin (Kecamatan Loceret, Ngronggot dan Sawahan)
Pelaksanaan	:	Rabu, 29 Mei 2024
Hasil	:	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembega Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan menurunkan angka Pernikahan Dini di Kabupaten Nganjuk sekaligus sebagai upaya dalam percepatan penurunan Stunting yang diharapkan di Tahun 2024 sudah harus tercapai angka 14 %

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.04.2.03.0001
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	1. Rapat Koordinasi 2. Layanan Komprehensif (Konseling permasalahan pada keluarga, anak dan calon keluarga)
Peserta	:	1. Pengurus Puspaga Kabupaten Nganjuk 2. Klien Puspaga Kabupaten Nganjuk
Pelaksanaan	:	Kamis, 28 Maret 2024
Hasil	:	1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepengurusan Puspaga 2. Terlaksananya Layanan Komprehensif (Konseling permasalahan pada keluarga, anak dan calon keluarga)

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.05.2.01.0001
Sub Kegiatan	:	Penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten /Kota
Kegiatan	:	Rapat Penyediaan data pilah gender dan anak
Peserta	:	55 orang
Pelaksanaan	:	28 Mei 2024
Hasil	:	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tersedianya data gender dan anak di semua OPD

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.05.2.01.0002

Sub Kegiatan : Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten Kota

Kegiatan : Pembuatan buku Profil gender

Peserta : 14 orang

Pelaksanaan : 18 Nopember 2024

Hasil :
1. Terlaksananya Rapat Pencetakan Buku Profil Gender
2. Terlaksananya Cetak buku Profil gender dimana buku ini sebagai bahan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.03.2.02.0001
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pemberian Hibah
Peserta	:	1 Lembaga
Pelaksanaan	:	Hibah dapat digunakan untuk kegiatan selama 12 bulan (Januari - Desember)
Hasil	:	1. Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kepolisian, Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan Pengadilan Negeri Nganjuk. 2. Penjangkauan kasus ke rumah korban atau tempat kejadian perkara; 3. Mediasi, advokasi, dan konseling 4. Sosialisasi kepada publik sebagai bentuk pencegahan dan pemahaman kepada masyarakat 5. Biaya operasional pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.03.2.03.0004

Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan kab/kota

Kegiatan :
1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan
2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Peserta :
1. 100 orang X 1 Kegiatan (terdiri dari perwakilan peserta perempuan dan perwakilan dari dunia usaha di wilayah Kabupaten Nganjuk)
2. 80 orang X 4 Kegiatan (terdiri dari forum pimpinan kecamatan, organisai perempuan, dan perwakilan aparatur desa serta kecamatan)

Pelaksanaan :
1. Bertempat di Ruang Rapat Candi Lor. Pada Tanggal 20 Juni 2024
2. Bertempat di Aula Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 - 7 November 2024

Hasil :
1. Terbangunnya persepsi yang sama terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Nganjuk
2. Terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara stake holder di Tingkat kabupaten, kecamatan & kelurahan/desa serta lingkungan kerja dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

3. Terciptanya masyarakat yang tanggap dan perduli terkait tindakan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.06.2.01.0001

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :
1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA
2. Sosialisasi Kecamatan Layak Anak
3. Pemenuhan Data Desk Aplikasi KLA
4. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak

Peserta :
1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA (60 orang terdiri dari OPD, Organisasi Masyarakat, Media dan Dunia Usaha serta Forum Anak)
2. Sosialisasi Kecamatan Layak Anak (125 Orang terdiri dari perwakilan aparatur Kecamatan dan Desa se – Kabupaten Nganjuk serta Forum Anak)
3. Pemenuhan Data Desk Aplikasi KLA (60 Orang terdiri dari Perwakilan OPD, Organisasi Masyarakat, Media, dan Forum Anak)
4. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (180 Orang terdiri dari OPD, Puskesmas se Kabupaten Nganjuk, LKSA, Organisasi Masyrakat)

Pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA (dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 di Ruang Rapat Dinas Sosial PPPA)
2. Sosialisasi Kecamatan Layak Anak (dilaksanakan pada hari Selasa 14 Mei 2024 di Ruang Rapat Anjuk Ladang)
3. Pemenuhan Data Desk Aplikasi KLA (dilaksanakan pada hari Selasa 30 April 2024 di Ruang Rapat Dinas Sosial PPPA)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

4. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (dilaksanakan pada hari Senin – Kamis Tanggal 7 – 10 Oktober 2024 di Ruang Rapat Anjuk Ladang)

Hasil : 1. Menguatkan Sinergitas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk mengoptimalkan implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan Persiapan Evaluasi Kabupaten Layak Anak
2. Memberikan pemahaman bagi aparatur di tingkat kecamatan tentang pengimplementasian kebijakan kabupaten layak anak guna mendukung pemenuhan hak anak
3. Menjaring dan memberikan pelatihan serta konsultasi terkait pengisian aplikasi evaluasi KLA untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak sudah dilaksanakan di tingkat Kabupaten / Kota
4. Memberikan pemahaman terhadap SDM atau petugas layanan anak khususnya tentang konvensi hak anak dan pemenuhan hak anak sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM terlatih KHA serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.06.2.01.0002

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

Kegiatan :
1. Pengukuhan dan Penguatan Kapasitas Pengurus Forum Anak
2. Pertemuan Rutin Pengurus Forum Anak
3. Festival Hari Anak Nasional
4. Sehari Menjadi DPR Deklarasi 5
5. Evaluasi Kepengurusan Forum Anak

Peserta :
1. Pengukuhan dan Penguatan Kapasitas Pengurus FA (45 Orang terdiri dari Pengurus, Fasilitator, Pembina dan Pendamping Forum Anak)
2. Pertemuan Rutin Pengurus Forum Anak (38 Orang terdiri dari Pengurus, Fasilitator dan Pendamping Forum Anak)
3. Festival Hari Anak Nasional (250 Orang terdiri dari FORKOPIMDA, Asisten, Pembina, Pendamping, Fasilitator, Pengurus FA dan Perwakilan Murid SD di Wilayah Kecamatan Nganjuk)
4. Sehari Menjadi DPR Deklarasi 5 (125 Orang terdiri dari Perwakilan siswa tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kabupaten Nganjuk, Pengurus, Fasilitator, Pendamping, Pembina, dan Pimpinan DPRD Nganjuk)
5. Evaluasi Kepengurusan Forum Anak (45 Orang terdiri dari Pengurus, Fasilitator, Pembina dan Pendamping Forum Anak)

Pelaksanaan :
1. Pengukuhan dan Penguatan Kapasitas Pengurus FA (dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 7 – 8 Februari 2024 di Ruang Rapat Dinas Sosial PPPA)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

2. Pertemuan Rutin Pengurus Forum Anak (Dilaksanakan Setiap Bulan Selama 11 Kali mulai bulan Februari – Desember 2024 di Ruang Rapat Dinas Sosial PPPA)
3. Festival Hari Anak Nasional (dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo)
4. Sehari Menjadi DPR Deklarasi 5 (dilaksanakan hari sabtu dan minggu tanggal 14 – 15 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Nganjuk)
5. Evaluasi Kepengurusan Forum Anak (dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu Tanggal 12 – 13 November 2024 di Kota Yogyakarta)

Hasil : 1. Sebagai bentuk pemenuhan Hak Anak atas partisipasi anak dalam perencanaan Pembangunan
2. Mengoptimalkan peran Anak yaitu pertisipasi anak dalam perencanaan pembangunan serta pelopor dan pelapor dapat terpenuhi sehingga Hak Anak tercukupi
3. Menjaring suara dan aspirasi anak sehingga arah pembangunan juga berorientasi pada pandangan anak sebagai bentuk implementasi hak anak

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.07.2.01.0005

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan kab/kota

Kegiatan : Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Peserta : 35 orang (terdiri dari perwakilan guru bimbingan konseling tingkat SMP/MTs di Kabupaten Nganjuk)

Pelaksanaan : Hari Rabu 23 Oktober di Aula Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk

Hasil :

1. Memaksimalkan Penanganan kasus Kekerasan terhadap Anak melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam Perlindungan Anak
2. Memberikan pemahaman kepada Guru Bimbingan Konseling (BK) tentang Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
3. Meningkatkan Pemahaman guru BK tentang Manajemen Kasus Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Korban Kekerasan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening	:	2.08.07.2.02.0005
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pemberian Pelayanan kepada korban kekerasan
Peserta	:	2 Orang korban kekerasan terhadap anak
Pelaksanaan	:	Pelayanan diberikan sepanjang tahun 2024 selama bulan Januari s/d Desember 2024
Hasil	:	1. Penjangkauan korban kekerasan terhadap anak 2. Pemberian konseling dalam pemulihan kondisi psikis korban kekerasan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.07.2.02.0006
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Kegiatan : Pemberian Pelayanan kepada korban kekerasan
Peserta : 4 Orang korban kekerasan terhadap anak
Pelaksanaan : Pelayanan diberikan sepanjang tahun 2024 selama bulan Januari s/d Desember 2024
Hasil : 1. Penjangkauan korban kekerasan terhadap anak
2. Pemberian konseling dalam pemulihan kondisi psikis korban kekerasan

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Supriyadi No. 07 Telp (0358) 3550772 Fax. 3550772 Kode Pos 64412
Email: dinsospppa@nganjukkab.go.id

LAPORAN

Kode Rekening : 2.08.07.2.03.0005

Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota

Kegiatan : Roadshow Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilembaga Pendidikan

Peserta : 10 Lokasi x 100 orang = 1.000 orang (terdiri dari perwakilan siswa, guru serta wali murid di setiap sekolah sasaran)

Pelaksanaan :
1. Hari/Tgl : Selasa 16 Juli 2024 di SMPN 2 Prambon
2. Rabu 17 Juli 2024 di SMPN 7 Nganjuk
3. Kamis 18 Juli 2024 di SMAN 1 Ngronggot
4. Senin 22 Juli 2024 di SMAN 1 Sukomoro
5. Selasa 23 Juli 2024 di SMK PGRI 1 Nganjuk
6. Rabu 24 Juli 2024 diSMAN 3 Nganjuk
7. Kamis 25 Juli 2024 di SMAN 1 Gondang
8. Selasa 30 Juli 2024 di SMK Muhamadiyah 1 Nganjuk
9. Rabu 31 Juli 2024 di SMPN 1 Berbek
10. Kamis 1 Agustus 2024 di SMK NU Pace

Hasil :
1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi orang tua, guru dan anak didik tentang perlindungan anak,pemenuhan hak anak serta kepentingan terbaik anak
2. Meminimalkan Kasus kekerasan yg terjadi pada anak
3. Meminimalkan Kasus eksploitasi seksual pada anak

Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010